

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
BERBASIS MASYARAKAT DESA SOREANG KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan Diusulkan oleh

ASRIAYU MURSAL

Nomor Stambuk : 105610510714



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
BERBASIS MASYARAKAT DESA SOREANG KABUPATEN TAKALAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun Dan Diusulkan Oleh :

ASRIAYU MURSAL

Nomor Stambuk : 10561 05107 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar
Nama Mahasiswa : Asriayu Mursal
Stambuk : 10561 05107 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

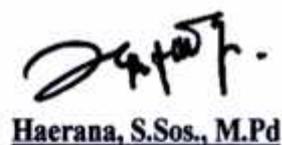
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

Pembimbing II



Haerana, S.Sos., M.Pd

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Ihsan Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

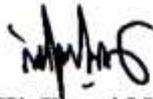
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan mengujiujian Skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 0005/FSP/A. 1 – VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ilyani Malik, S.Sos, M.Si



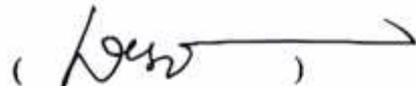
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)



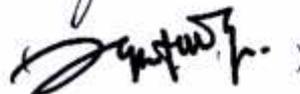
2. Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si



3. Drs. Ruskin Azikin, MM



4. Haerana, S.Sos., M.Pd



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Asriayu Mursal

Nomor Stambuk : 10561 05107 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Januari 2019

Yang menyatakan


Asriayu Mursal

ABSTRAK

ASRIAYU MURSAL. *Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar* (dibimbing oleh Samsir Rahim dan Haerana).

Pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat merupakan sebuah kegiatan untuk membangun pangkalan data dan informasi pembangunan dalam rangka membantu peningkatan kinerja pembangunan dan kemandirian masyarakat untuk menuntaskan dan mencari solusi pembangunan yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pihak para pelaksana melalui program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian *fenomenologis*, informan penelitian berjumlah 9 orang dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sementara analisis data secara kualitatif dilakukan secara sistematis yakni redaksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat sudah dapat direalisasikan dengan baik, hanya saja perlu ditingkatkan lagi dalam setiap tahapan program yang dilakukan agar terbangun hubungan yang seimbang hal ini dilihat dari aspek Sosialisasi, Training of trainer, Pelatihan pendata, Pendataan, Pemrosesan data, dan Rekonfirmasi data. dalam pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat adakalanya Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini yaitu Peran pemerintah dan Dukungan masyarakat. Sedangkan Faktor penghambat yaitu waktu, Anggaran pemerintah dan, Informasi yang tidak valid.

Kata Kunci : *Sistem, informasi, pembangunan, berbasis masyarakat*

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi Alamin, Segala puji dan syukur tiada hentinya Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan keagunan-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selanjutnya peneliti haturkan terima kasih yang setulus- tulusnya kepada Ayahanda Mustari, Almarhuma Ibunda Hj.Salma, saudara saya Ahmad Mursal dan Citra Rahayu Mursal tercinta dimana dengan berkah doa, kasih sayang, dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin dalam mendidik, membina, merawat, membesarkan, dan mendampingi peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan ini peneliti mendapatkan banyak sekali bantuan dari berbagai pihak baik dari segi materi atau pun moril. Oleh karena itu perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya. Terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrulhaq S.Sos., M.AP selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Haerana S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing II dan Bapak Dr. Samsir Rahim S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
6. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa(i) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2014 Afiliasi khususnya kelas ADN-G'14 yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang selalu memberikan warna-warni dalam kehidupan penulis.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Reski Devi S.Sos, Sarmila S.Sos, Dian Ayu Lestari, Fera Juliana Fajar, Andi annisa, Siti Aulia Rahma, Mentari, Selviana arsyad S.Sos, Musdalifa S.Sos, Siti Hutami Sudirman S.Sos, Nurmiftahul Jannah S.Pd, Husnul Khootimah A.Md, Zahrawani, Zawil Qurba, Reskyana Ulfha Irwan, Ulfha Alfriani Amir, Mardatila, Putri Maepa Wulandari yang telah banyak memberi saran, dukungan, motivasi serta pembelajaran kepada penulis.
8. Kepada Bapak Kepala Desa, Pegawai Kantor Desa Soreang, Bapak Kasub Bappeda, Pegawai Bappeda, Bapak Ketua LPMT dan Masyarakat Desa Soreang yang bersedia memberikan informasi kepada penulis demi kelengkapan skripsi ini.

9. Dan terimakasih kepada seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberi motivasi, dukungan dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang berkenan memberi bantuan, baik moril maupun material hingga skripsi ini dapat terselesaikan, peneliti tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan Peneliti. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Peneliti demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Januari 2019


Asriayu Mursal

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsii
Halaman Persetujuan.....	.ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiahiv
Abstrakv
Kata Pengantarvi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	.x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Konsep Pelaksanaan.....	9
B. Konsep Pelaksanaan Program.....	11
C. Konsep Sistem Informasi	15
D. Konsep Pembangunan.....	18
E. Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat	21
F. Kerangka Pikir	28
G. Fokus Penelitian	29
H. Definisi Fokus Penelitian	30
BAB III. METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Keabsahan Data.....	38

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Obyek Penelitian	40
1. Letak Geografis Kantor Desa Soreang Kabupaten Takalar	40
2. Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran	41
3. Uraian Tahapan Kegiatan dan Waktu Program	43
B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Di Desa Soreang Kabupaten Takalar	44
1. Sosialisasi.....	47
2. <i>Training Of Trainer</i> (TOT)	52
3. Pelatihan Pendata	56
4. Pendataan.....	60
5. Pemrosesan Data.....	64
6. Rekonfirmasi data	69
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Di Desa Soreang Kabupaten Takalar	76
1. Faktor Pendukung	76
a. Peran Pemerintah	76
b. Dukungan Masyarakat	77
2. Faktor Penghambat	79
a. Waktu	79
b. Anggaran Pemerintah.....	80
c. Informasi Tidak Valid	81
BAB V. PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	36
Tabel 4.1 Data SIPBM 2016-2018.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 bagan kerangka fikir.....	29
Gambar 4.2 alur dari tahapan pemrosesan data.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait, sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, sementara itu, kebijakan yang tertuju pada kerangka kerja pembangunan, dapat memberikan pedoman-pedoman bagi pengimplementasian tujuan pembangunan ke dalam berbagai program maupun proyek. (Winarno,2012 : 22)

Dengan begitu sebagai suatu perubahan terencana dan berkelanjutan,pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu adanya implementasian ke dalam berbagai macam program pembangunan yang dimana dapat secara langsung mnyentuh masyarakat. Pembangunan di perlukan cara-cara atau pedoman tindakan yang dapat terarah mengenai hal ‘bagaimana’ meningkatkan kualitas hidup manusia. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi maupun perencanaan pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan. (Suharto, 2005:1)

Kebijakan di jalankan berupa program-program yang kemudian dijadikan proyek-proyek, dan akhirnya terbentuk pada kegiatan-kegiatan, baik itu dilakukan pemerintah, masyarakat dan maupun kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat. Di dalam masyarakat, terdapat dua macam keadaan: (1) terdapat

kemiskinan sekaligus kesenjangan, dan atau (2) tidak terdapat kemiskinan akan tetapi boleh jadi masih adanya kesenjangan. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan sangat kompleks dan sulit, serta upaya menanggulangi kemiskinan sekaligus kesenjangan adalah jauh lebih kompleks dan lebih sulit lagi. (Soetomo, 2006:12)

Perencanaan dan implementasi pembangunan setidaknya berisi usaha untuk memberdayakan mereka agar mereka dapat mengakses pada sumber-sumber ekonomi dan juga usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan termasuk dibidang pendidikan karena masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak berpendidikan ataupun masyarakat yang putus sekolah. Pembangunan pedesaan tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial akan tetapi melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak tergantung serta dapat lepas dari berbagai ikatan struktural yang membuat hidup sengsara. (Usman, 2004:25)

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia maupun peningkatan kesejahteraan dan juga pembangunan setidaknya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat desa dan mengakses pada sumber-sumber ekonomi serta menanggulangi kemiskinan yang masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak berpendidikan.

Sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat adalah sistem informasi yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam pelaporannya. Sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat dikembangkan guna memberikan peluang terhadap para penentu kebijakan, pemangku kepentingan, dan anggota masyarakat untuk dapat berpartisipasi menuntaskan dan mencari solusi permasalahan pembangunan di daerahnya, yang meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan maupun pembangunan bidang-bidang lainnya. Sumber data dapat diperoleh dari masyarakat setempat dengan keluarga beserta seluruh anggotanya sebagai unit analisis. Perolehan data dikumpul dengan melibatkan mekanisme hirarki kelembagaan dari satuan wilayah administratif yang paling rendah yakni lembaga kemasyarakatan (RT-RW) sampai dengan lembaga formal pemerintahan (Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten). Dengan begitu sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat dapat dikatakan sebagai pangkalan data serta informasi pembangunan yang dikembangkan melalui partisipasi masyarakat. Namun kenyataan yang ada dilapangan atau di desa soreang Kabupaten Takalar, kurangnya data mikro di desa tersebut untuk menentukan prioritas program pembangunan, kurangnya pelibatan masyarakat dalam menyelesaikan sendiri masalahnya. Dalam artian, masyarakat tersebut masih kurang memperhatikan adanya data. Data tersebut meliputi adanya program pembangunan pendidikan seperti berapa banyak anak yang tidak bersekolah, mengapa mereka tidak bersekolah, penyebab/alasan mereka tidak bersekolah dan

sebagainya. Di bidang kesehatan seperti berapa banyak anak yang belum di imunisasi, jumlah anak yang lahir hidup, dan sebagainya. Di bidang sosial ekonomi seperti berapa banyak penyandang cacat menurut jenis kelamin, jenis bantuan yang diperoleh oleh keluarga atau anggota keluarga dalam satu tahun terakhir, dan sebagainya. Di bidang sanitasi dan penerangan seperti fasilitas kepemilikan jamban, sumber penerangan rumah dan sebagainya. Di bidang perumahan seperti kepemilikan rumah, jenis dan luas atap rumah, dan sebagainya. Di bidang kependudukan seperti jumlah nama keluarga dan anggota keluarga menurut jenis kelamin, apa pekerjaan utama kepala keluarga dan sebagainya. Dan juga masih kurangnya kejujuran masyarakat terkait dengan data serta partisipasi dan kesadaran masyarakat akan data masih kurang sehingga data hanya dianggap pelengkap. Dan selama ini sering terjadi sebuah dokumen perencanaan yang buruk dan kurang menjawab permasalahan di masyarakat. Salah satu penyebab dari hal ini adalah bahwa perencanaan tersebut disusun dengan berbasis pada data yang tidak akurat. Dengan kata lain untuk menghasilkan perencanaan yang baik harus berbasis pada data yang akurat. Dalam hal ini bahwa akurasi data merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi. Disamping itu, data yang dihasilkan dari system informasi pembangunan berbasis masyarakat dapat di manfaat oleh masing-masing dinas yang terkait dan desa.

Sistem informasi juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan berbasis masyarakat yang menunjukkan posisi masyarakat yakni sebagai aktor atau manajer pembangunan dan melibatkan intervensi pihak lain seperti lembaga

swadaya masyarakat ataupun pemerintah. Sumbangan pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan yaitu masyarakat dapat menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah berkenaan dengan program-program yang dibutuhkan. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, dengan pendekatan partisipatif ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah faktor komponen masyarakat sendiri, faktor lainnya yaitu keterlibatan pihak ketiga sebagai fasilitator (pendamping). Untuk itu diperlukan peran fasilitator dalam upaya pemberdayaan sehingga masyarakat dapat merumuskan masalah, membuat rencana, serta mengorganisasikan dengan mengintegrasikan segenap sumber daya yang dimiliki. (Soetomo, 2013: 20)

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar nomor: 483 Tahun 2016 tentang penetapan wilayah intervensi, fasilitator kecamatan, fasilitator desa/ kelurahan, pendata dan petugas entry data program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM). Kabupaten Takalar membuat sebuah program kerja sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat guna membantu pemerintah dan masyarakat desa dalam membangun desa. Merujuk pada implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Desa. Program ini merupakan program baru yang mana program tersebut bekerjasama antar *unicef*-pemerintah RI yang diterapkan beberapa provinsi dan daerah termasuk di Kabupaten Takalar. Dalam terwujudnya program ini Kabupaten Takalar menetapkan tiga desa sebagai *pilot project*.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Suryati dkk, 2010 tentang pembangunan sistem informasi pendataan rakyat miskin untuk program miskin (raskin) pada desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dengan hasil yang didapatkan dari pembangunan sistem informasi pendataan rakyat miskin ini dapat memudahkan proses pengelolaan dan pengolahan data seluruh masyarakat. Dapat mempermudah laporan data masyarakat serta dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban kepada kepala desa.

Dengan adanya program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat sangat membantu untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa serta masyarakat tersebut dapat memberikan dampak yang baik dan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang pendidikan. Dan dikarenakan data ini rill, mikro dan mampu menunjukkan *by name by address* atas masalah yang ada. Oleh sebab itu, untuk mengetahui secara lebih mendalam terhadap program tersebut peneliti mengangkat judul **“Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis akan merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat Desa Soeang Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat subjektif, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah dalam menganalisis permasalahan masyarakat.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini agar dapat diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam membuat sebuah program kerja yang baik untuk masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus dapat memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian terfokus pada pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat di desa soreang Kabupaten Takalar.
3. Secara teoritis, diharapkan agar dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu administrasi, khususnya dibidang kebijakan publik, melalui pendekatan serta metode-metode dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang. Secara umum, pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Zarofah, 2016: 30) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan dilengkapi segala kebutuhan yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana dan kapan di laksanakan. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo (2000: 199) Pelaksanaan adalah sebagai proses bentuk serangkaian aktifitas, yakni bermula dari kebijakan untu mencapai suatu tujuan maka dari itu kebijakan diturunkan ke dalam suatu program proyek.

pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa kata pelaksanaan bermula pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, ataupun mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan tidak hanya aktifitas, akan tetapi kegiatan yang terencana dan dilakukan berdasarkan norma yang telah ditentukan dan dapat mencapai tujuan.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan yakni,

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dilaksanakan dengan secara baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi serta konsistensi informasi.
- b. Sumber daya, terdapat empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan yakni pengambilan keputusan atau kewenangan guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab serta fasilitas yang akan dibutuhkan.

Selain dua faktor diatas proses implementasi terdapat tiga unsur penting yaitu:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelaksana maupun pengawasan dari sebuah proses implemetasi. Syukur (dalam Zarofah, 2016: 31).

Menurut Water William (dalam Nawawi, 2007: 132) menyatakan bahwa masalah yang paling penting dalam implemetasi kebijakan memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan ataupun pengoperasian dengan cara tentu. Dan cara tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan mempunyai kemiripan dengan keputusan serta berfungsi dengan baik dalam hal lingkup lembaganya. Hal ini

mengandung pesan yang jelas dibanding dengan kesulitan menjembatani jurang pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan.

Keberhasilan kebijakan atau program juga berdasarkan proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dinyatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai prosedur dan ketentuan pelaksana yang telah dibuat oleh pembuat program yang terdapat didalamnya yakni pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil apabila program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut pandang proses, akan tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang akan dihasilkan ataupun sebaliknya.

B. Konsep Pelaksanaan Program

Sebagai dasar pemikiran guna mengungkapkan permasalahan yang akan dibahas ke dalam penyusunan penelitian ini, maka terlebih dahulu mendefinisikan pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308). Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (dalam Kurnia, 2013: 9) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dapat dilakukan seseorang dengan harapan yang akan mendatangkan baik hasil atau pengaruh.” Lebih jelasnya lagi, Hasibuan (dalam Kurnia, 2013: 9) juga mengatakan bahwa program yaitu, suatu jenis rencana yang jelas serta konkret

dikarenakan sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, serta waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu program ataupun kegiatan. Dalam program ada beberapa aspek, bahwa dalam setiap program dijelaskan :

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang akan diambil dalam mencapai suatu tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang akan dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Program terbaik didunia adalah program yang akan didasarkan pada model teoritis yang jelas, sebelum menentukan masalah sosial yang akan diatasi dan melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang cukup matang terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi sehingga dapat menjadi solusi terbaik (Suryana, 2009: 28). Selain itu, definisi program juga terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa : Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Dalam setiap proses pelaksanaan suatu program dapat dikatakan berhasil tidaknya suatu program, ataupun gagal sama sekali apabila dilihat dari wujud hasil yang akan dicapai ataupun *outcomes*. Karena dalam proses ini turut terlihat beragam unsur yang didalamnya berpengaruh serta sifat yang mendukung ataupun menghambat pencapaian target sasaran suatu program.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program yaitu sekumpulan kegiatan yang dilakukan baik individu maupun kelompok pelaksanaan kegiatan didukung kebijaksanaan, prosedur, serta sumber daya yang dimaksudkan dapat menjadi hasil tercapainya suatu tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pada umumnya merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena manusia yang membuat rencana hingga dengan mengawasi pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut. SDM harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas-tugas dalam organisasi. Adapun pengertian sumber daya manusia yang diungkapkan oleh Hani Handoko (2000: 233), sebagai orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usahanya dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, selain itu efektifitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Manajemen SDM yaitu bagian dari manajemen, dikarenakan teori-teori manajemen umum menjadi dasar pembahasannya. Manajemen SDM memiliki kekhususan

dibandingkan dengan manajemen pada umumnya, karena yang di “*manage*” adalah manusia, sehingga dengan begitu keberhasilan atau kegagalan manajemen SDM tersebut memiliki dampak yang sangat luas. Rachmawati (2008: 3) memberikan definisi manajemen SDM sebagai berikut :

Manajemen SDM adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai berbagai tujuan individu, maupun organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan (2006: 9), manajemen SDM merupakan suatu bidang yang mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Pembahasannya yakni pengaturan peranan manusia dalam terwujudnya tujuan yang maksimal. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan (*human resources planning*), pengorganisasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan organisasi, kepuasan karyawan, dan masyarakat.

Begitu pula dengan Sofyandi (2008: 6) yang mendefinisikan manajemen SDM adalah :

Manajemen SDM merupakan suatu strategi dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, leading dan controlling*, dalam setiap kegiatan/fungsi operasional SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, dan pemutusan

hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif oleh SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengintegrasian sumber daya manusia terhadap upaya tercapainya tujuan organisasi tersebut.

C. Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, karena informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (*information systems*). Sistem informasi merupakan komponen dalam sebuah organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. (Hisbanarto, 2014: 56).

Menurut Robert A. Leitch (dalam Jogianto, 2005:36). Sistem informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Menurut O'brian, J.A (2005: 23). Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, serta sumber daya data guna mengumpulkan serta menyebarkan informasi dalam organisasi.

Menurut Kadir (2008: 7), sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Sistem informasi selalu menggambarkan, merancang, mengimplementasikan dengan menggunakan proses perkembangan sistematis serta merancang sistem informasi berdasarkan analisa kebutuhan.

Sistem informasi merupakan salah satu faktor pendukung layanan informasi guna memenuhi kepuasan atau kebutuhan pengguna, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan informasi, azas-azas berupa prinsip-prinsip yang menjiwai sistem informasi baik pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian.

Azas pengelola, sistem informasi diselenggarakan apabila ada suatu unit kerja yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Tugas pengelola adalah melaksanakan koordinasi dalam pengembangan, pemeliharaan, pengoperasian permintaan data, pengembangan teknik dalam rangka pendayagunaan informasi, dan bertanggung jawab atas semua kelengkapan data dan informasi yang dihasilkan. (Hisbanarto, 2014: 58).

Azas fleksibilitas, sistem informasi dituntut mempunyai tingkatan toleransi yang tinggi terhadap seluruh unit kerja, sehingga sistem informasi mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Azas kesederhanaan, sistem informasi tersusun dari berbagai perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan prosedur yang mudah dimengerti oleh seluruh unit kerja, dan dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu harus ada prosedur dan

ketentuan yang jelas untuk membantu terselenggaranya sistem informasi. Azas saling percaya, sistem informasi dapat menimbulkan kepercayaan antar unit kerja yang satu dengan lainnya dalam arti :

1. Tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam pendayagunaan sistem informasi.
2. Tidak ada tumpang tindih tugas dan fungsi terutama dalam penyusunan rencana, pengelolaan, pemantuan dan pengambilan keputusan.
3. Tidak ada unit kerja yang hasil kerjanya atau informasinya sia-sia terhadap unit kerja lain.

Tingkatan sistem informasi dalam manajemen adalah sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi *e-busines*, dan sistem *e-learning*.

Sistem pemrosesan transaksi (*transaction system*)

1. Merupakan sistem informasi yang segala kegiatannya berhubungan dengan pemrosesan transaksi.
2. Sistem informasi manajemen (*manajemen information system*), merupakan sistem dengan kelengkapan pengelolaan dari proses yang menyediakan informasi untuk manajer guna mendukung operasi dan pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi (meningkatkan kualitas manajerial).
3. Sistem pendukung keputusan (*decision support system*), merupakan sistem yang menyediakan prosedur khusus dan pemodelan unik guna membantu manajer dalam memperoleh alternatif keputusan.

4. Sistem informasi *e-business*, merupakan sistem yang dibangun untuk pengintegrasian data atau informasi dari proses bisnis berbasis internet,
5. Sistem informasi *e-learning*, merupakan sistem yang dibangun guna menjawab tantangan pengintegrasian data atau informasi untuk dunia pendidikan.

D. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan pada dasarnya merupakan konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai perubahan yang sifatnya terencanakan, Setiap orang atau kelompok tentu akan menghasilkan perubahan yang memiliki bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan sebelumnya, untuk menghasilkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Subandi (dalam Susilawati, 2014:12).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli, yakni : pembangunan menurut Rogers (Rochajat: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (2004: 89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan pada awalnya digunakan dalam artian pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan. Apabila

pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat ataupun negara setiap tahunnya. Rochajat,dkk (2011:3).

Menurut siagian (dalam Fausi, 2013:16) memberikan pengertian pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dengan demikian proses pembangunan terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat. Maka penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan ataupun perbaikan maupun pertumbuhan.

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai serta sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaruan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal tersebut pengembangan motivasi usaha yang sifatnya produktif. Dan yang terpenting dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat dengan cara pembinaan dan dorongan maupun adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok, pertama masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, kedua masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia, manusia yang dimaksud adalah manusia

yang dapat kreatif dan bisa kreatif pada manusia yang merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang di cita-citakan, dalam hal ini transformasi ada dua hal yang harus diperhatikan, diantaranya keberlanjutan dan perubahan.

Menurut Rostow transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang akan dilalui oleh semua negara. Rostow berpendapat ada lima tahap dalam proses pembangunannya, yaitu :

1. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui adanya teknologi modern, akan tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan.
2. Persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modern untuk menuju negara industri.
3. Tinggal landas merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan disektor industri.
4. Masyarakat dewasa merupakan masyarakat menggunakan teknologi modern untuk melakukan semua kegiatan ekonominya.
5. Masa tingginya konsumsi masyarakat merupakan masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi tinggi untuk produksi barang dan jasa.

Teori pembangunan dalam perkembangannya semakin kompleks dan tidak terikat pada satu disiplin ilmu dinamika. Teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang sifatnya terbuka. Pengalaman selama ini bahwa implemetasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah banyak mengantar kehidupan mereka menjadi lebih baik bahkan sebagian dari mereka dapat dikatakan berlebihan, semetara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan pada kesengsaraan. Oleh sebab itu, permasalahan pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena setiap saat akan selalu muncul masala-masalah baru yang akan harus dipecahkan dan dapat menjadi solusi bagi pembangunan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa akan selalu ada pemecahan atas setiap masalah, tetapi juga selalu ada masalah atas setiap pemecahan masalah.

E. Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan berbasis masyarakat, secara umum dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengarah pada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memnfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan nilai-nilai sosial budaya). Yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh “orang luar” atau elit masyarakat yang merasa tahu dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi masyarakatnya. Theresia (2015: 28)

Pembangunan berbasis masyarakat, berarti pembangunan harus berbasis pada sumberdaya lokal, berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, menghormati atau berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki dan atau diyakini oleh masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, telahaan tentang pembangunan berbasis masyarakat akan mencakup :

- a. Pembangunan dari atas dan atau dari bawah (*top down/bottom up*)
- b. Pembangunan berbasis sumberdaya lokal.
- c. Pembangunan berbasis modal sosial.
- d. Pembangunan berbasis kebudayaan.
- e. Pembangunan berbasis kearifan lokal.

Pembangunan berbasis masyarakat, seringkali dikonotasikan dengan “pembangunan dari bawah” sebagai yang lebih baik “pembangunan dari atas”, tetapi secara empiris, pembangunan yang dirancang dari atas seperti yang dikembangkan oleh Scramm,dkk di Bangladesh ternyata juga mampu menunjukkan hasil yang baik.

Pembangunan dari atas (*top down*), menempatkan pemerintah pusat dan atau elit masyarakat bagi penetus gagasan, dengan asumsi mereka tahu yang terbaik masyarakatnya, tanpa harus mendengarkan atau mengakomodasi aspirasi masyarakat (bawah). Di sini, masyarakat dilibatkan atau menumbuhkan rasa takut. Sebaliknya, dari bawah (*bottom up*) memberikan kesempatan kepada masyarakat (bawah) untuk berinisiatif sejak perencanaan, dengan asumsi bahwa

masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, serta cara-cara terbaik yang cocok dengan kondisi mereka. (Theresia, 2015: 29)

Model pembangunan “dari atas” mempunyai sejarah filosofis dan praktik yang signifikan, mendahului model “dari bawah” model “dari atas” ini disusun seputar penggunaan kepemimpinan profesional yang diberikan oleh sumber daya eksternal yang direncanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan.

Sebaliknya, model pembangunan “dari bawah” merupakan strategi pembangunan sosial yang dikembangkan oleh Billups,dkk (2004: 89) yang meliputi :

- a. Mengembangkan partisipasi masyarakat yang komprehensif.
- b. Pengembangan memotivasi masyarakat lokal.
- c. Perluasan kesempatan belajar.
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya lokal.
- e. Replikasi pembangunan manusia.
- f. Peningkatan komunikasi dan pertukaran.
- g. Lokalisasi akses keuangan.

Dalam praktik kedua model, tersebut dapat digunakan untuk program pembangunan yang memiliki tujuan-tujuan untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat warga persepsi tentang bagaimana meningkatkan taraf hidup.

- a. Menciptakan masyarakat yang berorientasi perilaku dasar pada perubahan komunitas warga persepsi.
- b. Meningkatkan standar hidup diantara mayoritas warga.

Sulistyo (2010: 31) mengungkapkan beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pembangunan “dari atas”, disebutnya memiliki kelemahan dalam hal :

- a. Masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif dikarenakan peran pemerintah yang lebih dominan apabila dibandingkan peran dari masyarakat itu sendiri.
- b. Masyarakat tidak bisa melihat seberapa jauh suatu program telah dilaksanakan.
- c. Peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan ataupun hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program dari awal sampai dengan akhir.
- d. Tujuan utama dari program tersebut yang hendaknya akan dikirimkan kepada masyarakat tidak terwujud disebabkan pemerintah pusat tidak begitu memahami hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- e. Masyarakat akan merasa terabaikan karena suara mereka tidak begitu diperhitungkan dalam proses berjalannya suatu proses kegiatan.
- f. Masyarakat menjadi kurang kreatif dengan ide-ide mereka.

Adapun kelebihan pembangunan “dari atas”, yaitu :

- a. Masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan program karena sudah dapat berjalan sendiri dengan adanya peran pemerintah yang optimal.

- b. Hasil yang dikeluarkan dapat optimal karena biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah.
- c. Mengoptimalkan kinerja para pekerja di pemerintah dalam menyelenggarakan suatu program.

Di sisi lain, pembangunan “dari bawah” memiliki kelemahan dalam hal :

- a. Pemerintah akan tidak begitu berharga karena perannya tidak begitu besar.
- b. Hasil dari suatu program belum tentu baik dikarenakan adanya perbedaan tingkat pendidikan dan bisa dikatakan cukup rendah dibandingkan para pegawai pemerintah.
- c. Peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintah dalam menjalankan suatu program.
- d. Tujuan yang diinginkan oleh masyarakat akan dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat karena ide-idenya berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat bisa melihat apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan.
- e. Pemerintah tidak perlu bekerja secara optimal dikarenakan ada peran masyarakat lebih banyak.
- f. Masyarakat akan lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang akan digunakan dalam suatu jalannya proses suatu program.

Dalam program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam pembangunan diberbagai sektor. Proses pendataan tersebut membutuhkan waktu, sebab proses ini mensyaratkan partisipasi masyarakat

setempat. Segala tahapan penghimpunan informasi dari awal seutuhnya dilakukan oleh masyarakat dengan sistem Bottom up (bawah ke atas), sebab yang paling mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat adalah mereka sendiri. (Heriawan, 2009: 16-20)

Adapun tahapan proses kegiatan tersebut, meliputi :

- a. Sosialisasi, merupakan proses kegiatan untuk menyampaikan kegiatan dalam sebuah kelompok atau masyarakat guna memahami kegiatan serta dapat terlaksananya kegiatan tersebut.
- b. Training of trainer (TOT), merupakan pelatihan yang diperuntukkan untuk orang yang diharapkan setelah pelatihan mampu menjadi pelatih serta mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain terkait program sipbm yang akan dilaksanakan.
- c. Pelatihan pendata, pendata direkrut oleh para kepala desa/dusun sehingga yang menjadi pendata merupakan perwakilan masyarakat yang berasal dari lokasi sasaran dan tidak diperbolehkan pendata berasal dari lintas/luar lokasi sasaran. Sebab merekalah yang mengetahui secara pasti kondisi wilayah dan masyarakat yang bermukim pada wilayah tersebut. Pelatihan ini dijelaskan kepada tugas tentang pemetaan wilayah pendataan, dan melatih mereka tentang tata cara pengisian instrumen pendataan yang telah disepakati dan tata cara mewawancrai responden agar tidak merasa dipaksa dalam memberikan data.
- d. Pendataan, setiap pendata berkewajiban mendata sebanyak 50 hingga 70 KK. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini, antara lain kejujuran

pendata maupun kepala keluarga (KK) yang didata untuk memberikan informasi sebenarnya. Pendata harus mengunjungi rumah per rumah untuk menghimpun informasi. Respondennya adalah setiap kepala keluarga bukan rumah tangga. Pendata juga harus memasang tanda pada rumah yang telah didata agar tak terjadi pendataan ganda. Agar data yang dihasilkan pun akurat, maka pendata juga dituntut kecermatan, ketelitian dan ketekunan.

- e. Pemrosesan data, tahap pemrosesan data terdiri dari *editing*(pemeriksaan) dilakukan untuk memeriksa hasil pendataan dan apabila masih ada kesalahan dalam pengisian kuesioner maka kuesioner tersebut dikembalikan kepada pendata untuk disempurnakan kembali dengan melakukan interview pada responden, entri data, serta pengolahan data dan tabulasi. Hasilnya adalah rekapitulasi data sementara penduduk dan kemiskinan yang disajikan dalam bentuk *hard copy (print out)* sebagai acuan untuk rekonfirmasi data. Hasil rekonfirmasi ini selanjutnya akan menjadi angka tetap.
- f. Rekonfirmasi data, hal yang menarik dari kegiatan tersebut adalah melakukan rekonfirmasi data. Pada proses ini, setiap orang mempunyai hak bicara untuk mengoreksi data yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Legitimasi rekonfirmasi ditunjukkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil rekonfirmasi. Berita acara ini ditandatangani oleh kepala Desa/Lurah, perwakilan BPD/LKMD, masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan perwakilan rakyat dari setiap dusun.

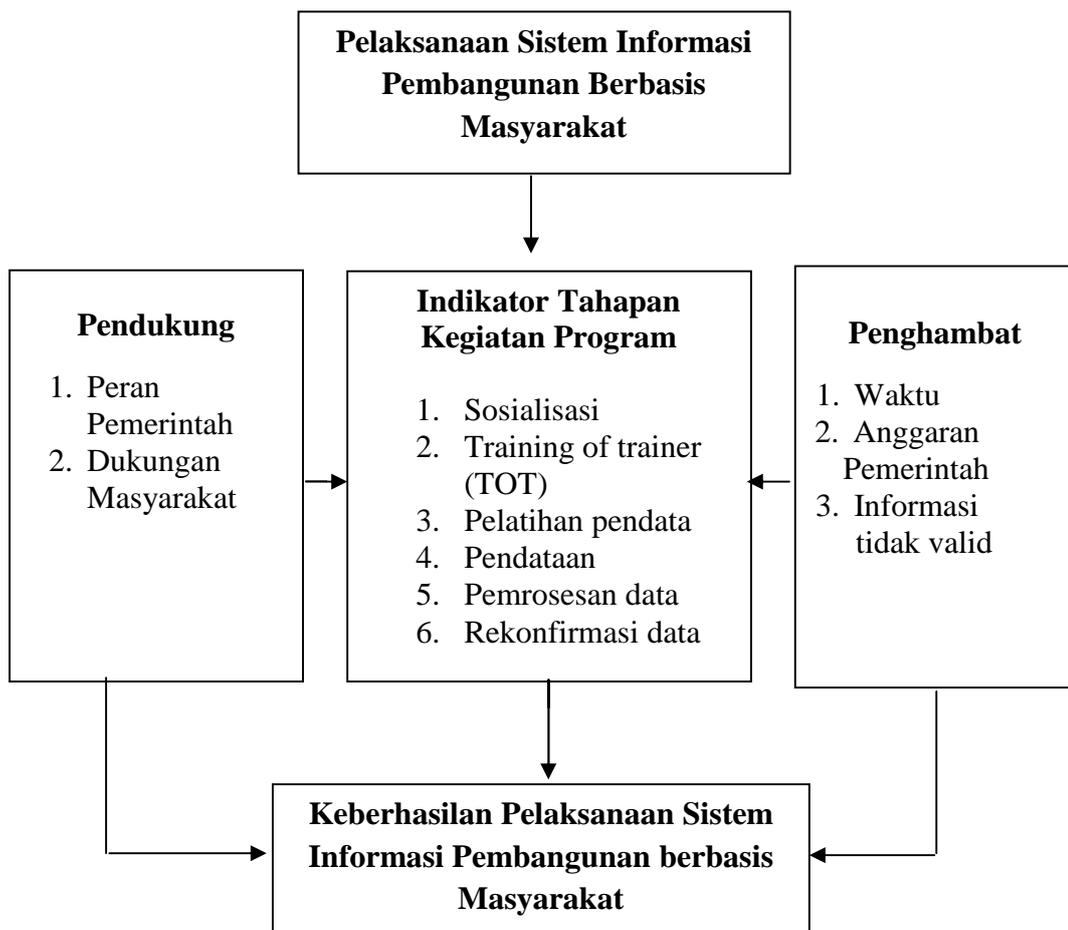
F. kerangka Pikir

Program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat di desa soreang Kabupaten Takalar merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam pelaporannya. Serta berperan sangat penting dan menentukan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya yang ada. Sehingga program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi bahwa perencanaan yang disusun tidak berbasis pada data yang tidak akurat. Dalam pelaksanaan program tersebut tak lepas dari beberapa kendala baik dari segi faktor penghambat maupun pendukung dan harus dicari solusi agar tidak mengganggu kegiatan yang berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, untuk melihat pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat perlu dilihat beberapa tahapan pelaksanaan program, kemudian dapat dinilai keberhasilan program dari ketercapaian tahapan tersebut meliputi adanya sosialisasi, training of trainer (TOT), pelatihan pendata, pendataan, pemrosesan data, dan rekonfirmasi data.

Program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat diharapkan mampu melaksanakan tahapan kegiatan yang efektif serta efisien, sehingga masyarakat yang ada di desa soreang Kabupaten Takalar mampu membantu peningkatan kinerja pembangunan. Maka untuk melihat penelitian ini, berikut

penulis mencoba menggambarkan alur penelitian seperti yang tampak dibawah ini.

Gambar 2.1
BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat di desa soreng Kabupaten Takalar.

H. Definisi Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pengukuran objek penelitian melalui data yang telah diperoleh, maka konsep tersebut yang telah dikemukakan diatas perlu dioperasionalkan secara rinci dalam indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, apa yang diperlukan, siapa dan kapan harus dilaksanakan, serta kapan dilaksanakan target implementasi tersebut. Semua itu telah direncanakan pada awal waktu. Suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan untuk mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.
- b. Sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat, merupakan prosedur pengumpulan data dari masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk dimanfaatkan masyarakat.
- c. Sosialisasi dan advokasi, merupakan proses kegiatan atau tahap pemaparan untuk kegiatan dalam sebuah kelompok atau masyarakat guna memahami kegiatan serta dapat terlaksananya kegiatan tersebut.
- d. Training of trainer (TOT), merupakan pelatihan yang diperuntukkan untuk orang yang diharapkan setelah pelatihan mampu menjadi pelatih serta mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain terkait program sipbm yang akan dilaksanakan.

- e. Pelatihan pendata, pendata direkrut oleh para kepala desa/dusun sehingga yang menjadi pendata merupakan perwakilan masyarakat yang berasal dari lokasi sasaran dan tidak diperbolehkan pendata berasal dari lintas/luar lokasi sasaran. Sebab merekalah yang mengetahui secara pasti kondisi wilayah dan masyarakat yang bermukim pada wilayah tersebut. Pelatihan ini dijelaskan kepada tugas tentang pemetaan wilayah pendataan, dan melatih mereka tentang tata cara pengisian instrumen pendataan yang telah disepakati dan tata cara mewawancarai responden agar tidak merasa dipaksa dalam memberikan data.
- f. Pendataan, setiap pendata berkewajiban mendata sebanyak 50 hingga 70 KK. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini, antara lain kejujuran pendata maupun kepala keluarga (KK) yang didata untuk memberikan informasi sebenarnya. Pendata harus mengunjungi rumah per rumah untuk menghimpun informasi. Respondennya adalah setiap kepala keluarga bukan rumah tangga. Pendata juga harus memasang tanda pada rumah yang telah didata agar tak terjadi pendataan ganda. Agar data yang dihasilkan pun akurat, maka pendata juga dituntut kecermatan, ketelitian dan ketekunan.
- g. Pemrosesan data, tahap pemrosesan data terdiri dari *editing*(pemeriksaan) dilakukan untuk memeriksa hasil pendataan dan apabila masih ada kesalahan dalam pengisian kuesioner maka kuesioner tersebut dikembalikan kepada pendata untuk disempurnakan kembali dengan melakukan interview pada responden, entri data, serta pengolahan data dan tabulasi. Hasilnya adalah rekapitulasi data sementara penduduk dan kemiskinan yang disajikan dalam

bentuk *hard copy (print out)* sebagai acuan untuk rekonfirmasi data. Hasil rekonfirmasi ini selanjutnya akan menjadi angka tetap.

- h. Rekonfirmasi data, hal yang menarik dari kegiatan tersebut adalah melakukan rekonfirmasi data. Pada proses ini, setiap orang mempunyai hak bicara untuk mengoreksi data yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Legitimasi rekonfirmasi ditunjukkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil rekonfirmasi. Berita acara ini ditandatangani oleh kepala Desa/Lurah, perwakilan BPD/LKMD, masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan perwakilan rakyat dari setiap dusun.
- i. Faktor penghambat, merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan terkendalanya program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat bagi pemangku kepentingan sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi terganggu dan tidak terlaksana secara maksimal.
- j. Faktor pendukung, merupakan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat bagi pemangku kepentingan sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan.
- k. Keberhasilan pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat di Kabupaten Takalar, ditinjau bagaimana permasalahan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dan berjalan dengan sangat baik sehingga menghasilkan pengharapan sesuai dengan kenyataan untuk mendaftarkan manfaat yang maksimal bagi

masyarakat guna menghasilkan profil pembangunan bidang pendidikan dan aspek-aspek pembangunan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan pada waktu yang disesuaikan. Dan penelitian ini berlangsung dikantor Desa Soreang Kabupaten Takalar. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian yaitu untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat desa soreang Kabupaten Takalar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas sumber data.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat fenomenologis yang merupakan salah satu jenis deskriptif kualitatif, dimana penulis berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau fenomena pengalaman informan yang didasari oleh kesadaran yang terjadi di Desa Soreang Kabupaten Takalar.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung terhadap responden atau pihak-pihak yang terkait dengan objek yang akan diteliti.
2. Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari sebuah pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengalihnya, seperti data dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat, foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan sekunder (*secondary informan*). Informan kunci adalah mereka yang dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan informan sekunder dibutuhkan untuk melengkapi informasi data/data tentang objek penelitian untuk memperkaya analisis, tetapi tidak mesti ada. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

N O	NAMA	Inisial	Jabatan	Ket
1	Arifin, S.AP M.AP	A	Kasub sosial budaya Bappeda	1 oran g
2	Sri Resky S, S.AP	SRS	Staf Fungsional Bappeda	1 oran g
3	Hasniati	H	Staf Pemerintahan Bappeda	1 oran g
4	Samuddin	S	Kepala Desa	1 oran g
5	Nurmawati	N	Sekretaris Desa	1 oran g
6	Haeda Nurhaeda Safitri	HNS	Perangkat Desa	1 oran g
7	Husain Mabe	HM	Ketua LPMT	1 oran g
8	Iis Ariyani Mansyur	IAM	Masyarakat	1 oran g
9	Wahyuni	W	Masyarakat	1 oran g
Jumlah				9 oran g

SUMBER: Kantor Bappeda Takalar dan Kantor Desa Soreang Kabupaten Takalar

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penulisan ini, penulis mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu Kasub dan staf Bappeda, Kepala desa dan staf desa, Ketua LPMT, dan masyarakat. Adapun wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar.

2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar. Teknik ini digunakan untuk mengetahui hubungan (*relevansi*) antara keterangan informan/responden dan data dengan kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan tetap mengontrol keabsahannya.

3. Studi kepustakaan (Dokumen)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data–data pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, makalah, majalah, hasil penelitian yang relevan, koran, dokumen–dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menuntun kita kearah temuan ilmiah, bila dianalisis. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2013) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Redaksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.
2. Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di pertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Sugiyono (2012) membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang sudah diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti melakukan perbandingan antara hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan lagi antara hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada..

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan data dari sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang didapatkan dari wawancara, kemudian melakukan pengecekan dengan observasi dan dokumen. Jika tiga teknik ini mendapatkan hasil data yang berbeda, maka peneliti harus mendapatkan data yang valid dengan cara melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber daya untuk mengetahui data mana yang benar atau mungkin semuanya benar karena pendapat mereka berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan narasumber, teknik wawancara ini dilakukan pada pagi hari pada saat narasumber masih segar bugar dan belum ada masalah sehingga akan memberikan data yang valid. Untuk itu pengujian kredibilitas ini dilakukan dengan mengecek wawancara, observasi dan teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Profil Desa Soreang Kabupaten Takalar.

Desa Soreang merupakan salah satu Desa dari Sembilan (9) Desa yang berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, yang terdiri dari 4 Dusun yang letaknya sangat dekat dengan Ibu Kota Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dengan jarak tempuh sekitar 0,5 km.

a. Batas Desa Soreang,

Utara : Desa Patani/Desa Salajo

Timur : Desa Patani

Selatan : Kelurahan Takalar

Barat : Desa Banyuanyara/Desa Ujung Baji

b. Luas wilayah Desa Soreang sekitar 217,15 Ha, berada diujung sebelah Barat Utara dari Kecamatan Mappakasunggu dan berbatasan langsung dengan salah satu Desa di Kabupaten Gowa.

c. Hidrologi dan Tata Air, Desa Soreang adalah Desa yang wilayahnya tidak memiliki sumber air bersih yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga di desasoreang diperoleh melalui PDAM/Air ledeng dan sebagian masyarakat berkebutuhan air bersih dengan air hujan.

d. Keadaan Topografi Desa Soreang adalah merupakan wilayah dataran rendah dan pesisir yang mempunyai letak wilayah dan letak wilayah dan mempunyai ketinggian beberapa meter diatas permukaan laut.

e. Iklim Desa Soreang memiliki iklim tropis dengan 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan kemarau.

2. Visi Misi, Tujuan dan Sasaran

a. Visi Desa Soreang adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

1) Maju : masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dengan desa yang maju.

2) Mandiri : masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.

3) Sejahtera : masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan)

4) Adil dan makmur : pemerataan pelayanan masyarakat tanpa membedakan status social dan menyalurkan bantuan desa pada masyarakat yang betul-betul memerlukan bantuan.

b. Misi Desa Soreang antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat lewat pengoptimalan perangkat Desa yang efektif.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa

3. Meningkatkan kualitas aparatur Desa.

4. Pengelolaan sumber daya alam yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

c. .Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan :

a) Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.

b) Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

c) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa.

d) Termanfaatnya dan terkelolanya sumberdaya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

e) Terciptanya masyarakat yang aman dan tentram.

2) Sasaran :

a) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter agamis, berbudaya, berahlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila.

b) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian desa, serta terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang handal guna meningkatkan mobilitas perekonomian.

c) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.

d) Meningkatkan taraf pendidikan

- e) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian, perikanan, industry, dan perdagangan.
- f) Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.
- g) Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (*good govermance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hokum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

3. Uraian Tahapan Kegiatan dan Waktu Program

Kegiatan SIPBM ini meliputi beberapa tahapan kegiatan yakni:

- a. Sosialisasi SIPBM selama 1 hari
- b. *Training Of Trainer* (TOT) bagi fasilitator pada Tim SIPBM dan Tim Entry Data selama 3 hari
- c. Pelatihan Pendata dan Tenaga Entry Data SIPBM (2 hari) di Ibu kota Kecamatan/Desa implementasi SIPBM
- d. Pengumpulan Data dan Editing (relative, 7 – 14 hari, tergantung pada rasio jumlah pendata dan jumlah Kepala Keluarga yang akan di data serta kondisi geografis desa yang bersangkutan)
- e. Entry data SIPBM (7 – 14 hari, tergantung rasio jumlah Kepala Keluarga yang akan di entry dan Jumlah Tenaga Entry yang direkrut) di ibu kota Kabupaten/Kecamatan
- f. *Cleaning/validasi data dan Analisis Data serta Pembuatan Profil Desa* (2-3 hari) di ibu kota Kabupaten/Kecamatan

- g. *Sosialisasi* Hasil SIPBM dan Penyusunan Rencana Aksi Desa (Minimal 1 hari, Idealnya 1,5 hari) di Ibu kota Kecamatan/Desa implementasi SIPBM.

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Desa Soreang Kabupaten Takalar

Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam pelaporannya. SIPBM ditujukan dalam rangka memberi peluang kepada para penentu kebijakan, pemangku kepentingan, dan anggota masyarakat untuk berpartisipasi menuntaskan dan mencari solusi permasalahan pembangunan di daerahnya, yang meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan dan pembangunan bidang-bidang lainnya. Sumber data diperoleh dari masyarakat setempat dengan menentukan keluarga beserta seluruh anggotanya sebagai unit analisis. Data dikumpulkan dengan melibatkan mekanisme hirarki kelembagaan dari satuan wilayah administratif yang paling rendah berupa lembaga kemasyarakatan (RT-RW) sampai lembaga formal pemerintahan (Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten). Secara sederhana SIPBM dapat dipandang sebagai pangkalan data dan informasi pembangunan yang dikembangkan berdasarkan partisipasi masyarakat.

Aspek pembangunan bidang pendidikan, SIPBM diharapkan dapat memberi gambaran tentang penduduk anak usia prasekolah (0-6 tahun) dan anak usia sekolah (7-18 tahun) yang memerlukan layanan pendidikan, di mana mereka

berada, dan apa yang mereka lakukan dan mengapa tidak memperoleh layanan pendidikan, jarak ke sekolah, alat transportasi yang digunakan. Dari aspek pembangunan bidang kesehatan dan bidang-bidang pembangunan lainnya, SIPBM diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proksi kualitas hidup, seperti antara lain: konsumsi garam beryodium, keberadaan, jarak dan penggunaan fasilitas kesehatan, kepemilikan akte kelahiran, kepemilikan kartu keluarga, dan pekerjaan orang tua.

Pada tahapan pelaporan, data dan informasi yang diperoleh dari Bappeda dan instansi yang terkait diharapkan dapat memberi perubahan tentang bagaimana pembangunan pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang pembangunan lainnya ditindak lanjuti dalam bentuk penyusunan rencana aksi desa bersama masyarakat. Dengan demikian, data yang telah dihasilkan melalui SIPBM dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk laporan untuk dikaji ulang sehingga masyarakat dapat secara mandiri menuntaskan dan mencari solusi permasalahan pembangunan yang ada wilayahnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tidak berlebihan jika visi SIPBM adalah “Memahami Potensi dan Persoalan Masyarakat”. Peneliti selanjutnya akan membahas hasil penelitian Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Desa Soreang Kabupaten Takalar dengan indikator sebagai berikut : (1) Sosialisasi, (2) *Training Of Trainer* (TOT), (3) Pelatihan Pendata, (4) Pendataan, (5) Pemrosesan Data, (6) Rekonfirmasi data. Berikut adalah data yang diperoleh oleh peneliti berkaitan dengan hasil pendataan SIPBM :

Table 4.1
DATA SIPBM 2016 - 2018
DESA SOREANG KABUPATEN TAKALAR

SEKTOR	JENIS DATA	MASALAH
KEPENDUDUKAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan KK • Kepemilikan Akte Lahir 	<p>1465 jiwa penduduk Desa Soreang 428 Kepala Keluarga Desa Soreang</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9,4% (atau 36 KK) tidak memiliki kartu keluarga - Akte Lahir 1465 Jiwa 722 Tidak Memiliki Akte Lahir dan 743 Jiwa Memiliki Akte Lahir
PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> • PAUD • Anak Tidak Sekolah (Belum pernah sekolah, putus sekolah dan lulus tidak lanjut) • Buta Huruf (Latin & Arab) 	<p>129 anak usia 3-6 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 anak terlayani PAUD - 31 anak sekolah di SD - 68 anak tidak terlayani PAUD <p>299 anak usia 7-18 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 anak belum pernah sekolah - 5 anak lulus SD tidak lanjut ke SMP - 11 anak lulus SMP tidak lanjut ke SMA - 2 orang anak putus di SD - 3 orang anak putus di SMA <p>93 penduduk usia 15-60 tahun ke atas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 39 orang yang tidak bisa membaca aksara latin - 87 orang yang tidak bisa membaca aksara arab
KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Penolong Persalinan • Asi Eksklusif • Imunisasi 	<p>43 Ibu Melahirkan (27 orang ditolong dokter dan bidan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 orang ditolong oleh dukun - 2 orang ditolong perawat - 9 Orang Ibu menyusui tidak memberikan ASI EKSKLUSIF - Dari 178 anak usia 0-5 tahun, 8 anak diantaranya BELUM DIIMUNISASI
PERUMAHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Rumah • Bagian terluas Atap 	<ul style="list-style-type: none"> - 307 Keluarga memiliki RUMAH dan 111 Keluarga atau 36,1% belum memiliki

	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian dinding terluas • Bagian lantai terluas 	<p>rumah (status pinjam/numpang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 keluarga atap rumahnya alang-alang, 5 keluarga daun rumbia. - 7 keluarga dinding rumahnya bambu, 29 keluarga dindingnya gamacca, 24 keluarga dindingnya papan lapuk dan 2 keluarga dindingnya tripleks. - 27 keluarga lantai rumahnya bambu dan 16 keluarga lantainya tanah.
SANITASI DAN AIR BERSIH	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan/tempat buang air besar • Jenis jamban 	<ul style="list-style-type: none"> - 32 keluarga BAB di bukan jamban (tidak memiliki jamban) - 43 keluarga memiliki WC/Jamban dengan jenis cemplung
PERLINDUNGAN ANAK	<ul style="list-style-type: none"> • Pernikahan Usia Anak • Pekerja Anak 	<p>Penduduk usia 0-18 tahun 490</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 anak menikah dini - 18 orang anak bekerja
SOSEK	<ul style="list-style-type: none"> • Kecacatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada 1 orang tuna daksa dan 1 orang tuna wicara

Sumber : Data SIPBM Desa Soreang kabupaten Takalar 2016-2018

Table 4.1 menjelaskan hasil data SIPBM Desa Sorelang Kabupaten Takalar 2016-2018. Dapat dilihat pada table diatas pada sector kependudukan terdapat 36 KK yang tidak memiliki katru keluarga, sebanyak 722 jiwa dari 1465 jiwa tidak memiliki aktr kelahiran. Pada sector pendidikan dilihat juga masih terdapat beberapa masalah dimana, masih ada beberapa anak yang tidak melanjutkan pendidikan yang dapat dilihat pada table diatas.

Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal diatas selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut.

1. Sosialisasi

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat apa, mengapa dan bagaimana memberi manfaat kepada pemangku kepentingan, penentu kebijakan, dan masyarakat setempat. Materi sosialisasi meliputi antara lain: Konsep dasar SIPBM, Tujuan pelaksanaan, Manfaat, kegiatan dan tahapan SIPBM serta pengalaman keberhasilan melaksanakan SIPBM. Adapun persiapan kegiatan yang dilakukan anatara lain :

a. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Dilaksanakan selama 1 hari di tempat yang memadai untuk melakukan diskusi sesuai dengan jumlah peserta, dalam ruangan yang bersih dan nyaman sehingga peserta dapat fokus dalam kegiatan diskusi.

b. Alat dan Bahan

1. Tempat kegiatan (ruangan yang dapat menampung 50-100 orang)
2. Spanduk tentang visi SIPBM (“SIPBM: Memahami Potensi dan Persoalan Masyarakat”)
3. Komputer/Laptop, LCD, Printer
4. Sound system,
5. Flipchart
6. ATK peserta

c. Materi Pendukung

1. Dasar Hukum SIPBM
2. Apa dan Mengapa SIPBM

3. Cerita Sukses SIPBM;

d. Metode Yang Digunakan

1. Presentasi
2. Diskusi dan tanya Jawab
3. Curah pendapat (*Brainstorming*)

e. Peserta

- Calon Fasilitator SIPBM (calon peserta TOT)
- Calon Tenaga Entry Data (calon peserta TOT)
- Camat Wilayah implementasi SIPBM
- Seluruh Kades wilayah implementasi SIPBM
- Seluruh Camat di Kabupaten yang bersangkutan
- Unsur Dinas Pendidikan Kecamatan implementasi (Guru, UPTD, Pengawas, Penilik)
- SKPD terkait (Bappeda, Kemenag, Dinkes, Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, unit kerja yang menangani kelurahan dll)
- Unsur Pers/Media
- LSM/NGO
- Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
- Peserta Sosialisasi tidak lebih dari 100 orang, jika peserta lebih maka dilaksanakan lebih dari satu angkatan.

Sosialisasi, merupakan proses kegiatan atau tahap pemaparan untuk kegiatan dalam sebuah kelompok atau masyarakat guna memahami kegiatan serta dapat terlaksananya kegiatan tersebut. Berkaitan dengan sosialisasi ini, peneliti kemudian mewawancarai selaku Kasub. Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Takalar sebagai berikut :

“Dengan cara mengundang para pemangku kebijakan yang terlibat dan masyarakat untuk bisa hadir kemudian di berikan sosialisasi. Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat memahami program yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat”, (Hasil wawancara A, 07 Agustus 2018).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa terkait dengan sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang para pemangku kebijakan dan masyarakat untuk melakukan pertemuan disatu tempat kemudian diberikan sosialisasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya salah satu hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu selaku Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“Terakhir sosialisasi tahun 2016 bersama UNICEF dan berlangsung sehari dan di ikuti sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari calon Fasilitator SIPBM, SKPD terkait yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dll, serta tokoh masyarakat”, (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sosialisasi terakhir kali dilakukan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dua tahun terakhir ini tidak lagi dilakukan. Hasil ini dibuktikan dengan hasil observasi langsung dilapangan oleh peneliti, dimana peneliti tidak melihat adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu selaku Perangkat Desa mengatakan :

“Sosialisasi diadakan secara musyawarah, yang artinya sosialisasi harus dilakukan dengan mengundang masyarakat setempat agar masyarakat juga mengetahui mengenai rancangan program yang akan dilakukan pemerintah” (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).

Dengan hasil ini dapat dikatakan sosialisasi dilakukan dengan musyawarah yaitu mengumpulkan masyarakat setempat kemudian menjelaskan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Hasil ini sesuai dengan observasi langsung kelapangan dimana peneliti melihat ada beberapa desa yang melakukan pertemuan kemudian petugas yang bertugas menerangkan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan juga tahapan-tahapan apa saja yang akan dilakukan. Tetapi adapula desa yang tidak melakukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan banyak faktor salah satunya faktor waktu, dimana sebagian masyarakat sibuk bekerja sosialisasi dilakukan ketika ada proses pendataan dari rumah ke rumah. Hal ini dianggap efektif dikarenakan sebagian masyarakat tidak memiliki waktu untuk berkumpul pada satu tempat dan melakukan sosialisasi. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu selaku SEKDES mengatakan :

“Dilaksanakan dengan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang terlibat maupun masyarakat kemudian dijelaskan mengenai kegiatan yang akan dilakukan” (Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018).

Adapun hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Ketua LPMT yang mengatakan :

“Menyangkut kegiatan ini dilaksanakan dengan baik, terakhir sosialisasi dilakukan pada tahun 2016 yang berlangsung dikantor bupati bersama tiga desa lainnya yang ada di kabupaten Takalar.”(Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Tidak jauh berbeda dengan jawaban dari informan berikut yaitu selaku Kasubid Pemerintahan yang mengatakan :

“Sosialisasi dilakukan di kantor Bupati, terakhir dilaksanakan pada tahun 2016 bersamaan dengan tiga desa lainnya yang ada di Kabupaten Takalar. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan arahan kepada setiap wakil dari desa masing-masing yang akan diberikan tugas untuk mendata setiap warga yang ada didusun mereka. Diharapkan dengan diberikannya sosialisasi ini maka akan mempermudah pemerintah dalam pelaksanaan SIPBM.”(Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Jawaban yang sama pun dikatakan oleh informan berikut ini selaku Kepala Desa yang mengatakan :

“Sosialisasi terakhir kali di selenggarakan itu pada tahun 2016 di kantor Bupati. Yang menghadiri sekitar 50 orang dari tiga desa yang ada di Kabupaten Takalar. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat yang mewakili desa masing-masing dapat menjelaskan mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Sehingga dengan adanya mereka dapat membantu tugas desa dalam sosialisasi mengenai SIPBM.” (Hasil wawancara S, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa pemerintah setempat melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang terlibat serta masyarakat setempat dan kemudian melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

2. *Training Of Trainer (TOT)*

Tujuan kegiatan ini Memberi kemampuan kepada para peserta pelatihan agar menguasai semua tahapan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan SIPBM, dan siap mentransformasikan kemampuan tersebut secara teknis operasional kepada para calon fasilitator SIPBM di daerah melalui suatu proses pelatihan. Adapun persiapan kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Dilaksanakan selama 3 hari, 2 ruang kelas yang terpisah, bersih dan nyaman serta memungkinkan untuk melakukan diskusi, uji coba dan simulasi

b. Alat dan Bahan

1. Tempat kegiatan
2. Spanduk dan tentative acara
3. Sound system,
4. Flipchat,
5. ATK peserta (Instrumen Keluarga/IK, Penjelasan pengisian IK, block note, pulpen dan pensil serta penghapus karet)
6. Intrumen keluarga / IK dalam ukuran besar/jumbo (dapat dibuat dalam bentuk baliho)
7. Komputer/Laptop, Printer, LCD

c. Materi Pendukung

- 1) Jadwal TOT
- 2) *Hand-out* Presentasi (a. Konsep Dasar SIPBM; b. Peran dan Fungsi Fasilitator; c. Simulasi Individual; d. Simulasi Berpasangan; e. Simulasi Fragmentasi; f. Simulasi Kasus dan *try-out*; g. Format Refleksi; h. Teknik Wawancara; i.Format RTL; j. IK SIPBM; k. Panduan IK-SIPBM; l. Teknik Rekrutmen Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Desa)
- 3) Materi lainnya (ikut dilampirkan jika dibutuhkan)
- 4) Metode Yang digunakan
 - 1) Presentasi
 - 2) Diskusi dan tanya Jawab

- 3) Role Play
- 4) Simulasi/ Kunjungan Rumah
- 5) Curah pendapat/ Barainstorming
- 6) Pelatih
- 1) Tim SIPBM/Fasilitator Nasional
- 2) Peserta

Tim SIPBM Kabupaten/fasilitator daerah (jumlah tergantung pada kebutuhan masing-masing kabupaten/desa secara proporsional)

3) Kriteria Peserta

Bappeda dan SKPD terkait, PERS, LSM/NGO (diutamakan LSM lokal di Kecamatan/Kab). Pelaku Program Pemberdayaan, Unsur BPS Kabupaten, Unsur Perguruan Tinggi, unsur Pemerintah Kecamatan;

- 1) Diutamakan bukan pejabat struktural/penentu kebijakan, karena dikhawatirkan tidak punya waktu cukup untuk membantu;
- 2) Cukup punya waktu, komitmen dan peduli terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan;
- 3) Berpengalaman dalam program pemberdayaan masyarakat (bukan syarat utama).

Training of trainer (TOT), merupakan pelatihan yang diperuntukkan untuk orang yang diharapkan setelah pelatihan mampu menjadi pelatih serta mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain terkait program yang akan dilaksanakan. Berikut hasil wawancara dengan informan

pertama yang terkait dengan TOT yaitu selaku Kasub. Sosial Budaya BAPPEDA yang mengatakan :

“Sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah desa dalam hal sosialisasi mengenai yakni kegiatan sipbm yang akan dilakukan” (Hasil wawancara A, 07 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil diatas maka dapat dijelaskan bahwa peran TOT sangat membantu pemerintah setempat dalam sosialisasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dimana ada beberapa masyarakat yang dilatih untuk menjelaskan kembali kepada warga setempat. Dengan adanya TOT sangat membantu pemerintahan setempat dalam menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya hasil wawancara informan kedua yaitu selaku Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“Dilaksanakan oleh Kabupaten untuk memudahkan ke camat, desa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan rumah pemerintah kecamatan” (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa TOT dilaksanakan oleh kabupaten agar memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh camat maupun desa. Selanjutnya hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Perangkat Desa yang mengatakan :

“Membantu pendata dalam memberikan kemampuan ataupun bimbingan terkait penguasaan seluruh tahapan pelaksanaan soal kegiatan pendataan.” (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan ketiga bahwa TOT yang dilakukan sangat membantu pendata untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

Dengan adanya TOT yang diberikan kepada pendata, dapat mengurangi risiko kesalahan pendataan masyarakat. Sehingga hasil data dapat sesuai dengan yang diharapkan. Hasil ini sesuai dengan observasi langsung yang dilakukan peneliti. Dimana peneliti mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh pendata, terlihat pendata begitu terampil dalam melakukan pendataan begitu pula ketika mengisi data-data yang diperlukan. Selanjutnya hasil wawancara informan keempat yaitu selaku SEKDES yang mengatakan :

“Peran TOT sangat membantu dalam membantu pemerintah desa dalam sosialisai mengenai kegiatan yang akan dilakukan” (Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan keempat dapat dikatakan bahwa adanya TOT sangat membantu pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Ketua LPMT yang mengatakan :

“Menyangkut dengan kegiatan TOT sangat-sangat membantu, karena dengan adanya kegiatan ini maka orang yang telah diberikan pelatihan dapat membantu menjelaskan kepada orang lain menyangkut dengan kegiatan yang akan dilakukan.” (Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Jawaban yang hampir sama dikatakan oleh selaku Kasubid Pemerintahan yang mengatakan :

“Bagus sekali, karena kegiatan TOT memberikan pelatihan kepada pendata untuk mendapatkan pelatihan bagaimana cara mendata masyarakat. Ini akan mempermudah proses pendataan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tidak terjadi yang namanya kesalahan data. (Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Jawaban yang hampir sama juga dikatakan oleh selaku Kepala Desa Pemerintahan yang mengatakan :

“TOT atau dikatakan Training Of Trainer itu merupakan kegiatan yang diberikan oleh pendata agar dapat memahami dengan baik mengenai prosedur dan tata cara mengisi instrument pendataan. Dengan adanya TOT, dapat membantu pendata untuk lebih memahami lagi tugas yang diberikan kepada mereka. (Hasil wawancara S, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan beberapa keterangan dari informan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran TOT sangat penting agar pendata dapat mengerti dengan baik tugas yang diberikan kepada mereka. Tidak hanya itu TOT juga sangat membantu dalam mempercepat pendataan. Hasil ini sesuai dengan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti.

3. Pelatihan Pendata

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, dan pengetahuan teknis tentang pengumpulan data menggunakan kuesioner pendataan SIPBM atau yang dikenal dengan Instrumen Keluarga (IK) SIPBM serta memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku positif bagi tenaga pendata atau pencacah dan kepala Desa di dalam melaksanakan pendataan.

Pelatihan pendata, direkrut oleh para kepala desa/dusun sehingga yang menjadi pendata merupakan perwakilan masyarakat yang berasal dari lokasi sasaran dan tidak diperbolehkan pendata dari lintas/luar lokasi sasaran. Sebab merekalah yang mengetahui secara pasti kondisi wilayah dan masyarakat yang bermukim diwilayah tersebut. Pelatihan ini dijelaskan kepada tugas tentang pemetaan wilayah pendataan, dan melatih mereka tentang tata cara pengisian instrumrn pendataan, dan melatih mereka tentang tata cara mewawancarai responden agar tidak merasa dipaksa untuk memberikan data. Hasil wawancara responden

berdasarkan indikator pelatihan pendata yaitu selaku Kasub. Sosial Budaya BAPPEDA mengatakan :

“Dengan cara setiap calon pendata diseleksi dengan syarat calon pendata harus orang yang benar-benar penduduk asli dan memahami watak budaya warga setempat. Pelatihan pendataan dilakukan pelatihan mengenai bagaimana cara melakukan pendataan yang benar.” (Hasil wawancara A, 07 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan pertama dapat dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang pendata harus melalui tahap seleksi dengan syarat calon pendata harus orang yang mengerti watak dan budaya warga setempat agar pendata dapat dengan mudah mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.. Hasil ini diperkuat dengan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti, dimana peneliti mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pendata. Dari beberapa pendata yang peneliti amati, rata-rata pendata adalah orang asli daerah tersebut dan juga mengenal sangat baik budaya dan watak para warga sekitar, sehingga proses pendataan warga berjalan dengan santai dan penuh dengan candaan. Peneliti merasakan suasana penuh kekeluargaan dalam proses pendataan. Selanjutnya hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“perekrutan pelatihan pendata dilakukan dengan memilih pendata sesuai dengan lokasi pendata. Kemudian pelatihan pendata dilakukan dengan bersurat kedesa untuk direkrut, isi materinya bagaimana, dan bagaimana cara mengisi instrument.” (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perekrutan pelatihan pendata harus benar-benar sesuai dengan lokasi sasaran dan kemudian di lanjut dengan perekrutan dengan menyurat ke desa, dimana isinya mengenai

materi dan bagaimana tata cara mengisi instrument-instrument yang ada di *form*. Selanjutnya hasil wawancara informan ketiga yaitu selaku Perangkat Desa yang mengatakan :

“perekrutan pelatihan pendata itu dilakukan di setiap desa / perwakilan dengan maksud di tunjuk untuk mendata dan dengan seseuai lokasi sasaran, prosedur pengumpulan data asal usia 0 – 18 dari masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui permasalahan pendidikan dan mencari cara untuk mengatasinya.”, (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil diatas dapat dijelaskan bahwa setiap dusun memiliki perwakilan pendata masing-masing untuk melakukan pendataan, serta pelatihan pendata dilakukan untuk mengetahui permasalahan pendidikan dan mencari cara untuk mengatasinya. Hasil ini sesuai dengan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti, dimana setiap dusun memiliki masing-masing perwakilan untuk pendataan pada desa masing-masing. Sehingga dapat mempercepat pendataan di desa tersebut. Selanjutnya hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku SEKDES yang mengatakan :

“Perekrutan dilakukan di desa masing-masing dimana setiap desa satu pendata sehingga dapat mempercepat proses pendataan yang ada di desa. Pelatihan diberikan agar pendata dapat mengisi format yang baik dan benar, selain itu pelatihan pendata juga dilakukan untuk mensosialisasikan informasi pembangunan.” (Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat dijelaskan bahwa setiap dusun memiliki perwakilan masing-masing untuk pendataan, serta untuk mensosialisasikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Hal ini dapat mempercepat proses pendataan. Hasil ini sesuai dengan keterangan informan sebelumnya, dimana setiap desa memiliki perwakilan pendataan sehingga proses

pendataan akan lebih cepat. Hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku

Ketua LPMT yang mengatakan :

“Menyangkut dengan pengrekrutan pendata itu dipilih berdasarkan perwakilan setiap dusun. Jadi mereka inilah yang mengetahui situasi yang ada di dusun mereka masing-masing sehingga pendata akan lebih mudah untuk melakukan pendataan, dan responden akan terlihat tidak ada unsur paksaan dalam memberikan data yang diinginkan, dan mendapatkan data sedetail mungkin dari masyarakat.” (Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Hasil yang hampir sama dikatakan oleh selaku Kasubid Pemerintahan yang mengatakan :

“Pengrekrutan pendata itu dilaksanakan atau dipilih oleh desa yang mewakili setiap desa. Karena perwakilan inilah yang dinilai dapat mewakili watak atau kondisi di dusun mereka masing-masing.” (Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Adapun hasil wawancara informan selanjutnya yaitu selaku Kepala Desa yang mengatakan :

“Pendata itu direkrut dari dusun masing – masing, dimana setiap pendata ini mewakili warga dari dusun mereka. Yang mengerti suasana dan kondisi yang berada di dusun mereka. Ini sangatlah penting dalam melakukan pendataan agar responden tidak merasa dipaksa dalam memberikan data.” (Hasil wawancara S, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa pengrekrutan pendata dilakukan oleh pemerintah setempat dengan perwakilan setiap dusun serta alasan dilaksanakannya pelatihan pendata yaitu untuk mengetahui permasalahan pendidikan dan mencari cara untuk mengatasinya serta mendapatkan data yang akurat dari masyarakat. Hal ini diharapkan setiap perwakilan memahami situasi yang ada di dusun mereka masing-masing sehingga dapat mempermudah dalam proses pendataan.

4. Pendataan

kejujuran Pendataan, merupakan orang yang mendata dan mengunjungi beberapa rumah agar mendapat informasi dan hasil yang akurat. Mengunjungi dari rumah kerumah dianggap efektif dalam menghasilkan data yang akurat. Setiap pendata berkewajiban sebanyak 55 KK hingga 70 KK. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pendata maupun kepala keluarga (KK) yang didata untuk memberikan data yang sebenarnya. Pendata harus mengunjungi dari rumah kerumah untuk menghimpun informasi. Respondennya adalah setiap kepala keluarga bukan rumah tangga. Pendata juga harus memberikan tanda setiap rumah yang telah didata agar tidak terjadi pendataan ganda. Agar data yang dihasilkan pun akurat, maka pendata juga dituntut cermat, ketelitian dan ketekunan. Adapun data hasil pendataan yang diperoleh peneliti sebagai berikut :

Dari hasil wawancara wawancara responden menyangkut bagaimana yang dilakukan para pendata ketika turun kelapangan untuk mendapat hasil data yang akurat yaitu selaku Kasub. Sosial Budaya BAPPEDA mengatakan :

“Dengan melakukan wawancara responden atau masyarakat yang hendak di data sesuai dengan petunjuk instrument kemudian memberikan atau menempelkan cap bertanda bahwa rumah masyarakat tersebut telah di data, Materi pendataan berupa jumlah penduduk secara terperinci, anak usia sekolah berdasarkan usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, anak/penduduk yang belum sekolah, anak yang putus sekolah, alasan tulus tidak lanjut sekolah dan jumlah KK”, (Hasil wawancara A, 07 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil data yang akurat maka pendata mewawancarai responden atau masyarakat yang hendak di data dengan memberikan atau menempelkan cap

bertanda bahwa rumah tersebut telah di data agar memudahkan pendataan dan tidak membuat keliru. Materi yang diberikan kepada pendata berupa jumlah penduduk, jumlah anak sekolah berdasarkan usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun, anak yang belum sekolah dan yang putus sekolah dan jumlah KK yang ada di daerah tersebut. Hasil ini sesuai dengan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dimana, pendata mendatangi dari rumah ke rumah kemudian melakukan wawancara langsung kepada warga atau setiap kepala keluarga dan pendata mengisi format yang ada. Hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“Si pendata Mendata dari rumah ke rumah dan mencap dalam artian memberi label agar memudahkan mana rumah yang telah di data dan yang belum terdata. Setelah itu menunggu hasil dari informasi si pendata”, (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berdasarkan dari keterangan informan berikutnya dapat dijelaskan bahwa, untuk mendapatkan hasil yang akurat pendata mendatangi rumah warga satu persatu kemudian mewawancarai secara langsung untuk mendapatkan hasil yang akurat. Hasil ini sesuai dengan penjelasan hasil wawancara yang pertama, dimana menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil data yang akurat, pendata mewawancarai responden atau masyarakat secara langsung. Cara ini dinilai efektif untuk mengantisipasi risiko data yang tidak akurat atau data yang tidak sebenarnya. Adapun hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Perangkat Desa mengatakan :

“Mewawancarai responden sesuai format apa-apa yang telah dibagikan sebelumnya itu akan nantinya yang dilakukan menjadi bahan oleh si pendata ke responden”, (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara informan sebelumnya yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil yang akurat pendata mewawancarai responden dan kemudian mengisi format yang ada. Hasil ini membuktikan bahwa untuk mendapatkan hasil yang akurat langkah yang ampuh dilakukan yaitu mewawancarai secara langsung responden yang ingin didata dengan cara mendatangi rumah responden satu persatu. Adapun hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku SEKDES yang mengatakan :

“melakukan wawancara langsung dengan masyarakat setempat. Biasanya dilakukan dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah bagaimana suasana saat wawancara tersebut berjalan dengan baik.” (Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara informan sebelumnya. Yaitu dengan wawancara warga setempat dengan menggunakan metode bahasa daerah agar proses pendataan bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang akurat. Hasil menjelaskan bahwa dalam melakukan wawancara ada baiknya menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat setempat agar masyarakat dengan cepat mengerti apa yang ditanyakan oleh pendata. Hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Ketua LPMT yang mengatakan :

“Biasanya pendata turun kelapangan dengan mewawancarai secara langsung narasumber dalam hal ini adalah masyarakat. Itu merupakan metode yang efektif untuk mendapatkan data yang akurat. Pendata juga biasanya memilih

waktu wawancara di sore hari, karna biasanya kepala keluarga sudah pulang dari aktivitasnya, sehingga akan mempermudah lagi dalam proses pendataan.” (Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Hasil yang hampir sama dilontarkan informan barikut ini yaitu selaku Kasubid Pemerintahan yang mengatakan :

“Pendata mendatangi rumah warga satu persatu kemudian melakukan pendataan dengan narasumber kepala keluarga atau yang dapat mewakili kepala keluarga. Pendata juga harus pintar-pintar memilih narasumber untuk melakukan wawancara jangan sampai informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.” (Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Jawaban yang sama pun dikatakan informan berikut ini yaitu selaku Kepala Desa yang mengatakan :

“Yang sering dilakukan yaitu wawancara langsung dengan narasumber yang akan didata. Ini masih menjadi metode yang efektif dalam memperoleh data yang akurat. Sehingga dapat mengurangi risiko salah data.” (Hasil wawancara S, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan beberapa hasil informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan pendata ketika turun kelapangan adalah mendatangi rumah warga satu persatu kemudian melakukan wawancara langsung kepada kepala keluarga. Materi yang diberikan kepada pendata berupa jumlah penduduk, jumlah anak sekolah berdasarkan usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun, anak yang belum sekolah dan yang putus sekolah dan jumlah KK yang ada di daerah tersebut Hasil ini sesuai dengan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dimana terlihat bahwa pendata mendatangi rumah warga satu persatu kemudian melakukan proses pendataan.

5. Pemrosesan Data

Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan praktik pemeriksaan isian data yang telah terkumpul melalui Instrumen Keluarga (IK) SIPBM, sekaligus melakukan praktik perbaikan data yang tidak sesuai pengisiannya sebagaimana yang diatur pada Panduan Pengisian IK SIPBM, termasuk di dalamnya cara mengisi data yang baik, benar dan lengkap. Peta masing-masing identitas data yang harus dikaji ulang melalui praktik pemeriksaan dan perbaikan sesuai dengan Panduan Pengisian IK SIPBM sebagai berikut:

a. Keterangan Lokasi

Bagian ini merupakan struktur hirarki kode wilayah (Kodewil) dari provinsi sampai RW dan RT dari mana responden berasal. Sebagai *reference-file*, keterangan lokasi ini adalah salah satu komponen validasi data yang sangat penting, yang mutlak harus diisi oleh pendata dengan baik dan benar.

b. Pengesahan Pencacahan

Bagian ini diisi oleh data identitas responden, pendata, dan pemeriksa, yang digunakan untuk mengecek keabsahan data instrumen ini untuk diolah berdasarkan triangulasi responden-pendata-pemeriksa. Keabsahan data dinyatakan sah jika ketiga nama dan tanda tangan mereka tertera pada instrumen pengumpul data.

c. Keterangan Kepala Keluarga

Bagian ini diisi oleh data tentang identitas, kepemilikan kartu keluarga, dan pekerjaan utama kepala keluarga responden sumber data berdasarkan kode pekerjaan yang tersedia (a.l.: kode 1 untuk Pegawai Negeri, kode 2 untuk Pegawai Swasta dst.)

d. Perumahan

Bagian ini diisi oleh data tentang status kepemilikan dan kondisi atap, dinding, dan lantai rumah yang ditinggali oleh responden sumber data.

e. Sanitasi dan Penerangan

Bagian ini diisi oleh data tentang kepemilikan dan jenis jamban, sumber penerangan dan sumber air minum beserta kualitasnya, serta jarak antara sumber air minum dengan *septic tank*.

f. Kesehatan

Bagian ini diisi oleh data tentang jumlah anak yang lahir dan masih hidup serta tinggal pada kabupaten yang sama, peristiwa kehamilan dan kelahiran serta pertolongan kelahirannya, di samping juga ditanyakan tentang pemberian ASI Eksklusif pada bayi berusia 6-12 bulan, peristiwa kematian bayi, dan konsumsi garam beryodium.

g. Fasilitas Pendidikan Terdekat

Bagian ini diisi oleh data tentang fasilitas pendidikan, dari PAUD sampai sekolah menengah, termasuk jarak, alat transportasi yang digunakan, dan waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai fasilitas pendidikan tersebut.

h. Fasilitas Kesehatan Terdekat

Bagian ini diisi oleh data tentang fasilitas kesehatan, dari tingkat Poskesdes sampai Rumah Sakit, termasuk jarak, alat transportasi yang digunakan, dan waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai fasilitas kesehatan tersebut.

i. Lainnya

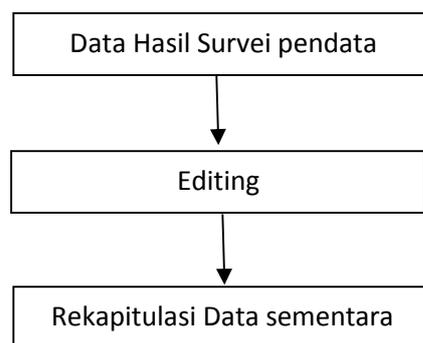
Bagian ini diisi data tentang bantuan Pemerintah Pusat/Daerah yang pernah diterima oleh salah seorang anggota keluarga untuk kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial/ekonomi dalam satu tahun terakhir (kalau ada)

j. Data Keluarga

Bagian ini diisi oleh data tentang informasi mengenai anggota keluarga yang tinggal bersama, yang meliputi antara lain: nama, NIK, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir dan umur, pendidikan tertinggi, riwayat imunisasi bagi yang berusia dini, kepemilikan akte kelahiran, informasi tentang penyandang cacat dan sebabnya, status marital, kegiatan anak usia 0-6 tahun, informasi tentang jenjang dan lokasi pendidikan yang sedang ditempuh, dan informasi/alasan tentang mereka yang tidak sedang mengikuti pendidikan. Informasi lainnya adalah informasi tentang anggota keluarga yang bekerja, dan tentang melek huruf latin, arab, serta agama yang dianut.

Berikut adalah alur dari tahapan pemrosesan data :

Gambar 4.2



Tahap pemrosesan data terdiri dari editing (pemeriksaan) dilakukan untuk memeriksa hasil dataan dan apabila ada kesalahan dalam pengisian kuesioner maka kuesioner tersebut dikembalikan pada pendata untuk disempurnakan

kembali kepada pendata untuk disempurnakan kembali dengan melakukan interview pada responden, entri data, serta pengolahan data dan tabulasi. Hasilnya adalah rekapitulasi data sementara penduduk dan kemiskinan yang disajikan dalam bentuk hard copy (print out) sebagai acuan untuk rekonfirmasi data.

Hasil rekonfirmasi ini selanjutnya akan menjadi angka tetap. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti berkaitan dengan indikator pemrosesan data yaitu selaku Kasub. Sosial Budaya BAPPEDA mengatakan :

“Memberikannya kepada staf desa hasil pendataan tersebut dan kemudian diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab yang akan disusun untuk mendapat hasil yang akurat”, (Hasil wawancara A, 07 Agustus 2018).

hasil yang sama didapatkan dari wawancara informan berikutnya yaitu selaku Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“Hasil data diverifikasi oleh tim ferifikator kemudian di Input ke pendata untuk memeriksa kembali lagi hasil pendataan apa bila terjadi kesalahan data”, (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berikut pula hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Perangkat Desa mengatakan :

“Memberikan data tersebut kepada operator di desa kemudian memeriksa kembali data apakah hasil tersebut masih terdapat kesalahan dan setelah didapat masing-masing data disusun.” (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).

Hal senada yang di sampaikan wawancara informan berikutnya yaitu selaku SEKDES mengatakan :

“Prosesnya yaitu seluruh hasil pendataan akan dilakukan pemeriksaan isian data yang telah dikumpul melalui instrumen keluarga kemudian melakukan perbaikan data staf yang telah ditugaskan ”. (hasil wawancara N, 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemrosesan data dilakukan dengan memberikannya kepada staf yang bertugas kemudian petugas memeriksa kembali data yang telah diberikan sesuai, setelah itu data tersebut diverifikasi ulang agar menghindari terjadinya kesalahan data. Tahap ini dilakukan oleh staf desa agar pendataan benar-benar akurat. Hasil ini sesuai dengan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, dimana setelah staf desa yang bertugas mendapatkan kumpul pengisian data dari responden, staf desa yang ditugaskan memeriksa kembali data yang telah diberikan. Jika terdapat data yang tidak sesuai maka pendata yang ditugaskan mewawancarai kembali responden atau masyarakat. Hasil wawancara selanjutnya dengan informan lainnya yaitu selaku Ketua LPMT yang mengatakan :

“Setelah hasil didapatkan, biasanya hasil tersebut diberikan kepada staf desa yang bertugas untuk mengumpulkan berkas. Setelah itu memeriksa kembali data-data tersebut sebelum di input. Jika terjadi kesalahan pendataan maka akan di data ulang oleh pendata yang diberi tugas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan data dengan yang ada dilapangan.”(Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Jawaban yang sama dikatakan oleh informan berikutnya yaitu selaku Kasubid Pemerintahan yang mengatakan :

“Biasanya setelah hasil pengisian data semua telah didapatkan, kemudian data tersebut dikumpulkan dan melakukan perbaikan data dimana cara mengisi data yang baik dan benar di desa dan akan di periksa kembali oleh staf desa yang bertugas. .”(Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Hasil yang sama juga dikatakan oleh informan selanjutnya yaitu selaku Kepala Desa yang mengatakan :

“Dikumpulkan ke petugas desa yang bertugas, kemudian setelah dianggap data tersebut sudah sesuai barulah diinput.”(Hasil wawancara S, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan selanjutnya ketika pengisian pendataan semua masyarakat selesai yaitu dikumpulkan ke kantor desa dan kemudian akan di periksa kembali oleh satf desa yang bertugas apakah masih terdapat kesalahan pengisian data yang telah diatur pada panduan pengisian IK SIPBM dan itu harus di kaji secara baik dan benar. Setelah data sudah dianggap benar maka tahap selanjutnya yaitu menginput data yang sudah ada.

6. Rekonfirmasi Data

Kegiatan ditujukan untuk memperbaiki kesalahan data yang diperoleh pada database awal SIPBM, yang meliputi kesalahan pengisian data atau adanya *output* data yang tidak rasional, sehingga diperoleh *database* akhir yang validitas dan reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan sebagai gambaran status pembangunan yang ada dan tindak lanjut kebijakan pembangunan yang diperlukan. Adapun persiapan kegiatan yang dilakukan yaitu :

a. Waktu dan tempat Kegiatan

Waktu yang dibutuhkan 2 – 3 hari, terdiri dari sehari untuk mengidentifikasi data yang error dan 2 hari untuk mencetak, dan jilid dokumentasi hasilnya. Tempatnya di ruangan yang cukup lapang dan bersih serta tersedia fasilitas listrik. Data yang akan diperbaiki ditampilkan menggunakan *LCD Projector* atau dan/atau format pendukung lainnya untuk mempermudah proses verifikasi dan perbaikan data..

- b. Alat dan Bahan yang harus dipersiapkan :
 - 1. Komputer/laptop, LCD Projector
 - 2. Pensil/pulpen
 - 3. Kabel roll
 - 4. Printer
 - 5. Kertas HVS
- c. Materi Pendukung
 - 1. Pedoman cleaning data (terlampir)
 - 2. IK yang telah diedit
 - 3. File IK Hasil Entri Data
 - 4. Aplikasi CSPro5 for Windows
 - 5. Tutorial penggunaan aplikasi entri data
 - 6. Kartu kontrol entri data
 - 7. Tabel monitoring perkembangan entri data
 - 8. Materi lainnya (ikut dilampirkan jika dibutuhkan)
- d. Peserta
 - 1. Tim entry yang dilatih
 - 2. Koordinator Tim Entry (mentor)
 - 3. Tim Fasilitator SIPBM daerah sebagai pendamping.
- e. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
 - 1. Kelengkapan Variabel yang dientri atau rangkuman data; contoh : Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur harus sama dengan Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin.

2. Logis tidaknya data yang sudah dientri; contoh : Anak Usia 6 Tahun sangat tidak mungkin sekolah di jenjang SLTP atau SLTA

Hal yang menarik dari kegiatan berikut adalah, melakukan rekonfirmasi data. Pada proses ini setiap orang memiliki hak untuk bicara untuk mengoreksi data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Legitimasi rekonfirmasi ditunjukkan dengan penandatanganan bicar secara kesepakatan hasil rekonfirmasi. Berita acara ini ditandatangani oleh kepala desa/lurah, perwakilan BPD/LKMD, masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan perwakilan rakyat dari setiap dusun. Adapun hasil wawancara dari informan berkaitan dengan indikator rekonfirmasi yaitu selaku Kasub. Sosial Budaya BAPPEDA mengatakan :

“Memeriksa ulang kembali data secara keseluruhan yang telah didapatkan sehingga terhindar dari data yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh database akhir” (Hasil wawancara A, 07 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa rekonfirmasi dilakukan dengan memeriksa ulang kembali data yang telah didapatkan dari pendata sehingga terhindar dari kesalahan data agar mendapatkan database akhir yang bisa dipertanggungjawabkan. Hasil yang sama dari wawancara informan berikutnya yaitu selaku Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA mengatakan :

“mengumpulkan kembali dan melakukan rekonfirmasi ulang atapun pemeriksaan ulang, setelah data dianggap benar kemudian diserahkan kepada kepala desa dan pihak yang bertanggung jawab” (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Hal senada yang di sampaikan wawancara informan berikutnya yaitu selaku Perangkat Desa mengatakan :

“Memeriksa kembali data yang terinput sesuai yang tertera di KK atau KTP dengan hasil pendataan yang telah di rekonfirmasi” (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).

Sedangkan hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku SEKDES mengatakan

“Biasanya data yang telah dikumpulkan dari awal akan diperiksa kembali melakukan rekonfirmasi data agar tidak terdapat database yang salah ketika input database akhir dilakukan ”(Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara ketiga informan diatas maka dapat dijelaskan bahwa rekonfirmasi data dikumpulkan ke desa dan kemudian data tersebut disesuaikan dengan data yang ada di KK atau KTP setelah semuanya telah diperiksa barulah data tersebut di input. Hasil data yang telah direkonfirmasi diharapkan tidak terdapat data yang tidak sesuai atau kesalahan pengisian data sehingga diperoleh database akhir yg dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini sesuai dengan hasil observasi langsung yang dilakakukan oleh peneliti, dimana staf desa memeriksa ulang data yang diberikan sesuai dengan KK atau KTP warga setelah itu barulah diinput ke computer. Hasil data ini diharapkan sesuai sehingga tidak diperlukan lagi pendataan ulang. Hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Ketua LPMT yang mengatakan :

“Menyangkut proses rekonfirmasi data, biasanya terdapat responden yang memberikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga harus diadakan rekonfirmasi data. Hal ini sangat merugikan karena data yang diharapkan adalah data yang actual sehingga pemerintah dapat merancang jenis kegiatan apa yang harus dilakukan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. ”(Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Hasil yang sama dikatakan oleh informan berikut yaitu selaku Kasubid Pemerintahan yang mengatakan :

“Hal inilah yang sangat penting dilakukan, mengapa, karena terkadang masyarakat memberikan informasi yang mengada-ngada atau tidak sesuai dengan yang ada dilapangan.”(Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Jawaban yang sama juga dikatakan oleh selaku Kepala Desa yang mengatakan :

“Sering kejadian ada beberapa masyarakat yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan, faktor ini dikarenakan ketika pendata datang ke rumah warga, kepala keluarga atau yang dapat mewakili tidak berada di rumah, melainkan hanya anak nya saja, sehingga kadang pendata hanya mewawancarai anaknya saja untuk mempersingkat waktu, makanya rekonfirmasi data wajib dilakukan untuk mengoreksi data-data yang diduga tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.”(Hasil wawancara S, 27 Agustus 2018).

Dari beberapa jawaban diatas sehingga dapat dikatakan bahwa, proses rekonfirmasi ulang data yang didapatkan sangatlah penting. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa warga yang memberikan informasi yang salah dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

Program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat adalah program yang melibatkan setiap kegiatan dalam proses kegiatan pembangunan. Sehingga ketelibatan masyarakat disini sangatlah penting. Peneliti mewawancarai beberapa masyarakat terkait dengan program SIPBM. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui tentang program SIPBM. Berikut adalah hasil wawancara informan pertama yaitu selaku warga yang mengatakan :

“saya tidak terlalu mengerti tetapi saya diberi tahu sama orang yang datang mendata kerumah, dia mengatakan kalau tujuan dia datang untuk mendata agar pemerintah desa tau tentang latar belakang keluarga saya. Dan untuk memudahkan pengelolaan pendata” (Hasil wawancara IAM, 29 Agustus 2018).

Jawaban yang lain dilontarkan informan selanjutnya yaitu selaku warga yang mengatakan :

“Apa itu saya baru dengar, tetapi saya dengar itu dari tetangga itu sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk mendata masyarakat agar dapat mengetahui kondisi masyarakat”. (Hasil wawancara W, 30 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat diatas, ternyata masih ada masyarakat yang tidak mengetahui sepenuhnya apa itu program SIPBM. Ini merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah setempat. Hasil ini sesuai dengan observasi langsung peneliti, dimana ketika peneliti menanyakan tentang program SIPBM, masyarakat tidak mengerti dengan yang peneliti katakan.

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang sosialisasi program SIPBM kepada masyarakat. Adapun hasil wawancara informan pertama yaitu selaku masyarakat yang mengatakan :

“Kalau kepala desa tidak pernah sosialisasi, tapi hanya orang yang pergi mendata yang tadi saya katakan yang memberikan penjelasan, kalo proses pendataan ini sangat penting katanya untuk kesejahteraan rakyat.”(Hasil wawancara IAM, 29 Agustus 2018).

Hasil wawancara berikutnya yaitu selaku warga yang mengatakan :

“Ada yang biasa datang kerumah. Dia bertanya-tanya seperti pergi mendata. Setiap rumah didatangi satu per satu.”(Hasil wawancara W, 30 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara informan diatas dapat dikatakan bahwa para pendata tidak memberikan penjelasan secara merata kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, dimana ada beberapa warga tidak mengetahui tujuan mereka didata.

Peneliti menanyakan manfaat yang diperoleh dengan program SIPBM kepada masyarakat. Adapun hasil wawancara informan pertama yaitu selaku warga yang mengatakan :

“Kalo keluarga saya pribadi mungkin manfaat yang didapatkan itu berupa timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendataan dan permasalahan disekitar pun dapat terselesaikan berupa permasalahan pendidikan.”(Hasil wawancara IAM, 30 Agustus 2018).

Hasil wawancara berikutnya yaitu selaku warga yang mengatakan :

Manfaat yang seperti dengan adanya program SIPBM tersebut anak-anak yang tadinya tidak bersekolah dapat kembali kesekolah,tapi hanya dari bidang pendidikan.”(Hasil wawancara W, 30 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat dari program SIPBM, karena kurangnya sosialisasi yang didapatkan oleh masyarakat. Sehingga dari keseluruhan jawaban masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat belum sepenuhnya disosialisasikan kepada setiap masyarakat dan ataupun program yang dijalankan masih kurang atau masih butuh pengimplementasian terhadap program SIPBM. Alasan dilakukannya program SIPBM untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, selainitu juga untuk mengetahui permasalahan pendidikan dan mencari cara untuk mengatasinya serta mendapatkan data yang akurat dari masyarakat.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Di Desa Soreang Kabupaten Takalar

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat bagi pemangku kepentingan sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan.

1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan program system informasi pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar terdapat dua factor pendukung yaitu peran pemerintah dan dukungan masyarakat.

a. Peran Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini ialah faktor yang berperan penting, Adapun hasil wawancara informan menyangkut faktor pendukung Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Di Desa Soreang Kabupaten Takalar yaitu selaku Kasub. Sosial Budaya BAPPEDA mengatakan :

“Pemerintah dalam hal ini kepala desa selalu memberikan motivasi dan selalu ikut serta mengambil bagian dalam mensukseskan pelaksanaan program SIPBM ”(Hasil wawancara A, 07 Agustus 2018).

Hasil wawancara berikutnya adalah selaku Perangkat Desa yang mengatakan:

“Pemerintah desa sering ikut serta dalam progrsm SIPBM untuk mempermudah pelaksanaan tersebut. Peran serta pemerintah desa sering dan kepala Dusun turut dilibatkan agar membantu proses kelancaran program tsb. Pendata terlibat langsung turun ke masyarakat untuk melakukan proses pendataan.” (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam program SIPBM adalah partisipasi pemerintah desa yang ikut serta dalam program SIPBM. Tidak jauh berbeda dengan hasil jawaban informan berikutnya yaitu selaku Kepala Desa yang mengatakan :

“Pemerintah sangat mensupport kegiatan ini sehingga itu yang membuat kami merasa dihargai dan dapat memberikan motivasi yang positif Masyarakat juga menyambut dengan baik pendata yang ditugaskan untuk melakukan pendataan, sehingga dapat mempermudah proses pendataan.” (Hasil wawancara S, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara responden diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah sangat mensupport kegiatan ini sehingga membuat penyelenggara merasa termotivasi dan semangat. Selain peran pemerintah yang begitu antusias, masyarakat juga memberikan respon positif terhadap program ini.

b. Dukungan Masyarakat

Program SIPBM bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan cara melakukan pembangunan dengan keikutsertaan masyarakat itu sendiri. Dukungan dari masyarakat sendiri dinilai penting agar program ini sukses sesuai dengan harapan pemerintah. Adapun hasil wawancara berikutnya adalah selaku Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“Menyangkut program SIPBM faktor SDM dan Masyarakat sangat berperan penting untuk mensukseskan kegiatan ini. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka program ini tidak dapat berjalan dengan baik”. (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat sangat berperan penting dalam mensukseskan kegiatan ini sehingga tanpa adanya

partisipasi masyarakat maka kegiatan ini tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Adapun hasil wawancara informan selanjutnya yaitu selaku SEKDES yang menyatakan :

“Masyarakat menyambut baik kedatangan pendata sehingga proses pendataan berjalan sesuai rencana dan terkendali. Karena dengan adanya proses pendataan yang dilakukan, pemerintah dapat mengambil keputusan kebijakan apa yang dibutuhkan masyarakat.” (Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018).

Adapun hasil wawancara informan selanjutnya yaitu selaku Ketua LPMT yang menyatakan :

“Masyarakat menyambut baik program pemerintah ini dan mau diajak kerja sama dalam memberikan data. Support pemerintah juga ikut memotifasi pendata dan staf yang berpengaruh semangat dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan.” (Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Hasil yang sama dikatakan oleh informan berikut yaitu selaku Kasubid Pemerintahan yang mengatakan :

“Faktor pendukung yaitu masyarakat memberikan respon yang positif dengan kegiatan ini. Keikutsertaan dan support pemerintah juga mempengaruhi pelaksanaan program SIPBM.” (Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Dari beberapa hasil wawancara informan diatas sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, program SIPBM ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerja sama antara warga dan pendata. Sehingga diharapkan masyarakat tidak mempersulit proses pendataan. Hasil ini sesuai dengan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, dimana selama pemeliteni mengikuti proses pendataan, masyarakat langsung menyambut kami dengan suntu dan memberikan minum. Selama proses pendataan juga masyarakat setempat tidak mempersulit proses pendataan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan terkendalanya program system informasi pembangunan berbasis masyarakat bagi pemangku kepentingan sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi terganggu dan tidak terlaksana secara maksimal. Adapun faktor penghambat yaitu waktu masyarakat, anggaran pemerintah, informasi tidak valid.

a. Waktu

Permasalahan waktu hal ini adalah tidak bisanya masyarakat yang ingin didata tidak berada ditempat yang disebabkan karena bekerja. Ini yang dapat menghambat proses pendataan. Adapun hasil wawancara yang dikatakan oleh informan berikut yaitu selaku Perangkat Desa yang mengatakan :

“Ketika responden tidak ada dalam artian responden tersebut tidak ada ditempat atau memiliki kepentingan lain diluar sehingga sulit untuk ditemui (wawancara).” (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).

Hasil wawancara yang hamper sama dengan informan berikut yaitu selaku SEKDES yang mengatakan :

“Masalah waktu, dimana sebagian warga yang bekerja tidak dapat mengikuti program SIPBM karena harus bekerja pada jam yang sama dengan kegiatan.” (Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018).

Hasil wawancara informan berikut juga mengatakan hal serupa yaitu selaku Ketua LPMT yang mengatakan :

“Yang menjadi penghambat mungkin adalah masalah waktu yang biasanya sebagian masyarakat memiliki aktivitas tersendiri seperti bekerja.” (Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, salah satu yang dapat menghambat proses pendataan yaitu susahny mendata warga yang sibuk untuk bekerja, sehingga dapat memperlambat proses pendataan. Hasil ini sesuai dengan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, dimana selama peneliti mengikuti proses pendataan terdapat beberapa warga yang tidak berada dirumah atau sedang bekerja. Terdapat pula keluarga dimana suami istri yang bekerja. Sulitnya menemukan waktu yang tepat untuk mendata warga yang dimana pagi hingga petang sibuk bekerja. Sehingga pendata harus berusaha menemukan waktu yang tepat agar tidak mengganggu baik itu aktivitas maupun tidak mengganggu waktu istirahat warga untuk melakukan pendataan.

b. Anggaran pemerintah

Anggaran pemerintah juga harus diperhatikan jangan sampai hanya karna anggaran tidak mencukupi sehingga program SIPBM tidak bisa berjalan dengan efektif. Hasil wawancara dikatakan oleh informan berikutnya yaitu selaku Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“Anggaran untuk pendataan SIPBM. Mengapa demikian karena untuk melakukan proses ini membutuhkan banyak biaya. Maka dari itu anggaran juga penting untuk diperhitungkan agar peserta yang masuk dalam program SIPBM dapat berjalan dengan baik” (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor penghambat program SIPBM adalah mengenai anggaran untuk pendataan SIPBM yang harus diperhitungkan baik-baik, sehingga proses pendataan dapat

berjalan dengan baik. Hasil ini sesuai dengan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, dimana selama proses pendataan setiap harinya mengeluarkan biaya makan dan transportasi dan masih banyak biaya yang lainnya. Sehingga betul dikatakan bahwa anggaran pemerintah menyangkut program SIPBM ini harus dikelola dengan baik jangan sampai anggaran tidak seimbang dengan pengeluaran yang dilakukan.

c. Informasi tidak valid

Informasi tidak valid biasanya terjadi hal ini sangat perlu diperhatikan jangan sampai hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan format yang telah ada atau panduan data yang telah ada. Adapun hasil wawancara informan yang berikut yaitu selaku Kasubid Pemerintahan yang mengatakan :

“Seperti apa yang telah saya jelaskan tadi bahwa terkadang ada saja masyarakat yang memberikan data yang bukan sebenarnya terjadi dilapangan sehingga dapat menghambat kegiatan SIPBM.” (Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Berdasarkan keterangan informan diatas dapat dijelaskan bahwa ternyata terdapat responden atau warga yang memberikan data yang bukan sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh kepala keluarga yang hendak didata tidak berada ditempat, sehingga pendata mewawancarai keluarga seperti anak, yang tidak masuk dalam kriteria responden. Sehingga inilah yang menjadi penyebab data yang diberikan keliru. Hasil yang berbeda dinyatakan oleh informan berikut yaitu selaku Kepala Desa yang menyatakan :

“Hampir tidak ada penghambat yang berarti yang dapat mempengaruhi proses kegiatan. Selama itu masih bisa diatasi dengan baik, maka penghambat dalam

pelaksanaan program SIPBM hampir tidak ada.” (Hasil wawancara S, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat dijelaskan bahwa hampir tidak terdapat masalah selama masalah tersebut bisa diatasi dengan segera. Dari berbagai hasil wawancara informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terkadang didapatkan informasi yang tidak valid.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ternyata terdapat responden atau warga yang memberikan data yang bukan sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik berupa :
 - (a) Sosialisasi kegiatan SIPBM sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu ditingkatkan lagi, dimana masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui informasi mengenai kegiatan SIPBM.
 - (b) Training of trainer (TOT) kegiatan SIPBM sudah berjalan dengan baik. bahwa peran TOT sangat penting agar pendata dapat mengerti dengan baik tugas yang diberikan kepada mereka. Tidak hanya itu TOT juga sangat membantu dalam mempercepat pendataan.
 - (c) Pelatihan pendata juga sudah berjalan dengan baik. dimana perekrutan pendata dilakukan oleh pemerintah setempat dengan perwakilan setiap desa dan alasan dilaksanakannya pelatihan pendata yaitu untuk mengetahui permasalahan pendidikan dan mencari cara untuk mengatasinya serta mendapatkan data yang akurat dari masyarakat. Hal ini diharapkan setiap perwakilan memahami situasi yang ada di desa mereka masing-masing sehingga dapat mempermudah dalam proses pendataan.
 - (d) Pendataan sudah berjalan dengan baik dimana bahwa yang dilakukan pendata ketika turun kelapangan adalah mendatangi rumah masyarakat satu persatu kemudian

melakukan wawancara langsung kepada kepala keluarga. Materi yang diberikan kepada pendata berupa jumlah penduduk, jumlah anak sekolah berdasarkan usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun, anak yang belum sekolah dan yang putus sekolah dan jumlah KK yang ada di daerah tersebut

(e) Pemrosesan data sudah berjalan dengan baik bahwa tahapan selanjutnya ketika pendataan semua warga selesai yaitu dikumpulkan ke kantor desa dan kemudian akan di periksa kembali oleh satf desa yang bertugas. Setelah data sudah dianggap benar maka tahap selanjutnya yaitu mengimput data yang sudah ada. (f) Rekonfirmasi data sudah berjalan dengan baik dimana proses rekonfirmasi ulang data yang diperoleh sangatlah penting. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa masyarakat yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan lapangan.

2. Faktor yang menjadi pendukung program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar terdiri dari beberapa factor yaitu :

(a) Peran Pemerintah, yang selalu mendukung dan memberikan support. (b) Dukungan Masyarakat, program SIPBM ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerja sama antara masyarakat dan pendata. Sehingga diharapkan masyarakat tidak mempersulit proses pendataan. dimana masyarakat langsung menyambut kami dengan baik dan memberikan minum. Selama proses pendataan juga masyarakat setempat tidak mempersulit proses pendataan.

3. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar terdiri dari

(a) Faktor waktu masyarakat yang bekerja disaat kegiatan SIPBM, susahnya mendata warga yang sibuk untuk bekerja, sehingga dapat memperlambat proses pendataan. dimana selama peneliti mengikuti proses pendataan terdapat beberapa warga yang tidak berada dirumah atau sedang bekerja. (b) Anggaran pemerintah, mengenai anggaran untuk pendataan SIPBM yang harus diperhitungkan baik-baik, sehingga proses pendataan dapat berjalan dengan baik. dimana selama proses pendataan setiap harinya mengeluarkan biaya makan dan transportasi dan masih banyak biaya yang lainnya. (c) Informasi yang tidak valid, Terdapat warga yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. terdapat responden atau masyarakat yang memberikan data yang bukan sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh kepala keluarga yang hendak didat tidak berada ditempat, sehingga pendata mewawancarai keluarga seperti anak, yang tidak masuk dalam kriteria responden. Sehingga inilah yang menjadi penyebab data yang diberikan keliru.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu :

1. Proses Sosialisasi harus ditingkatkan lagi, melihat masyarakat mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda-beda sehingga tidak cukup dengan hanya satu kali melakukan sosialisasi tetapi berkali-kali.

2. Setelah melakukan pelatihan pendata, tidak semerta-merta berhenti, tetapi pihak yang bertugas wajib mengontol proses pendataan agar tidak ada saling miskomunikasi antara pendata dan masyarakat.
3. Secara keseluruhan kegiatan pelatihan harus lebih ditingkatkan lagi melihat sistem informasi sudah berjalan cukup cepat. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi agar sosialisasi dapat menjangkau semua kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Tjokromidjoyo. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta. PT Gunung Agung
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta
- Heriawan Rusman, DR. 2009. *Pembelajaran Pelaksanaan MDGs di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Jakarta.
- Hisbanarto Vico, Yacub. 2014. *Sistem Informasi Pendidikan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Handoko, Hani. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, BPFE.
- Jogiyanto, H.M. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, ANDI. Yogyakarta.
- Kadir, Abdul. 2008. *Tuntunan Praktis Belajar Database Menggunakan Mysql,C.V Andi Offset*. Yogyakarta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya. PMN.
- Rachmawati, Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta. ANDI.
- Rochajat, Harun. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial Perspektif Dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2006. *Strategi- Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- ,2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Suhartono, PhD. *Analisis kebijakan, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung. Alfabeta.
- Sofyandi, Herman. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*, Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta
- , 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta
- Theresia, Aprilia. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung. Alfabeta.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Jurnal Suryati dkk. 2010 *Tentang Pembangunan Ssistem Informasi Pendataan Rakyat Miskin. Program Beras raskin (raskin) pada Desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan*. Vol 2, No. 4
- Digilib.unila.ac.id. Fauzi H. 2013. Bab II Tinjauan Pustaka, pengertian pembangunan. (diambil pada tgl 17 mei 2018)
- Eprints.uny.ac.id. Kurnia W Dwi. 2013. Bab II Kajian pustaka, kajian teori pelaksanaan. (diambil pada tgl 10 mei 2018)
- Eprints.uny.ac.id. Zarofah. 2016. Bab II Landasan teori. (diambil pada tgl 17 mei 2018)
- Repository.uin-suska.ac.id.2014. Bab II Landasan teori dan konsep pembangunan. (diambil pada tgl 10 mei 2018)
- <https://www.slideshare.net/jurnalsisteminformasi-slide>

Tabel 4.1**Jadwal Pelatihan Pendata IPBM - Alternatif I (Hari I)**

Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab	Keterangan
08.00 – 08.30	Pembukaan	Panitia	
08.30 – 09.00	Penjelasan Konsep dasar SIPBM	Tim Fasilitator	Pleno
09.00 – 09.15	Break pagi	Panitia	
09.15 – 12.00	Penjelasan IK	Tim Fasilitator	Diikuti oleh tim entry
12.00 – 13.00	ISHOMA		Selesai Ishoma, tim entry berpindah ke ruangan lain untuk pelatihan software
13.00 – 14.00	Simulasi sesi 1	Tim Fasilitator	Simulasi <i>role-playing</i>
14.00 – 15.00	Simulasi sesi 2	Tim Fasilitator	Simulasi berpasangan
15.00 – 15.15	Persiapan try out	Panitia	
15.15 – 15.30	Break sore	Panitia	
15.30 – 16.30	Pelaksanaan Try out	Tim SIPBM	
16.30 – 17.30	Evaluasi/editing hasil try out (evaluasi Proses hari 1)	Tim Fasilitator	
19.30 – selesai	Entry data hasil try out	Tim Entry	

Sumber : Draf Modul SIPBM 2015

Tabel 4.2**Jadwal Pelatihan Pendata IPBM - Alternatif I (Hari II)**

Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab	Keterangan
08.00 - 08.30	Penyampaian Hasil evaluasi/editing	Tim SIPBM	
08.30 - 09.00	Diskusi/Tanya jawab		
09.00 - 09.15	Break pagi		
09.15 - 10.30	Teknik Wawancara	Tim Fasilitator	
10.30 - 11.00	Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pendataan	Tim Fasilitator	
11.00 - 12.00	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sesi 1	Tim SIPBM	- Jadwal Pendataan - Penetapan Peta/blok
12.00 - 13.00	Ishoma		
13.00 - 15.15	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sesi 2	Tim SIPBM	- Penyusunan Tim Pendamping Desa Jadwal Pendampingan - Pembagian logistik pendataan
15.15 - 15.30	Break sore	Panitia	
15.30 - 16.30	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sesi 2		

Sumber :Draf Modul SIPBM 2015

DOKUMENTASI WAWANCARA



GAMBAR 01. Halaman Kantor Desa Soreang Kabupaten Takalar



GAMBAR 02. Proses wawancara terhadap informan Kasub Sosial Budaya Bappeda



GAMBAR 03. Proses wawancara terhadap informan Staf Fungsional Bappeda



GAMBAR 04. Proses wawancara terhadap informan Staf Pemerintahan Bappeda



GAMBAR 05. Proses wawancara terhadap informan Kepala Desa Soreang



GAMBAR 06. Proses wawancara terhadap informan Sekretaris Desa Soreang



GAMBAR 07. Proses wawancara terhadap informan Staf Perangkat Desa Soreang



GAMBAR 08. Proses wawancara terhadap informas masyarakat



GAMBAR 09. Proses wawancara terhadap informan masyarakat

DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi kegiatan sosialisasi SIPBM



Dokumentasi kegiatan Training of trainer SIPBM



Dokumentasi kegiatan pelatihan pendata SIPBM



Dokumentasi kegiatan pendataan SIPBM



Dokumentasi kegiatan pemrosesan data SIPBM



Dokumentasi kegiatan rekonfirmasi data SIPBM

BIODATA PENELITI



ASRIAYU MURSAL dilahirkan di Pattallassang pada hari Rabu tanggal 28 bulan November tahun 1995. Anak kedua dari Tiga bersaudara dari pasangan Mustari,S.Pd dan Almarmuhama Hj. Salmah memiliki satu saudara laki-laki yang bernama Ahmad Mursal dan satu saudarai perempuan yang bernama Citra Rahayu Mursal. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Pattallassang dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Takalar lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya pada SMA Negeri 1 Takalar lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin ilmu Admnistrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar”.